



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025 - 2029**



H. Herman Deru

Gubernur Sumatera Selatan

H. Cik Ujang

Wakil Gubernur Sumatera Selatan

“Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua”

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya, Renstra ini dapat diselesaikan. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan dasar penyusunan program, kegiatan dan anggaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu tahun 2025-2029. Rencana Strategis (RENSTRA) ini menggambarkan strategi, program dan kegiatan pembangunan tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dan kabupaten/kota secara menyeluruh serta mendeskripsikan secara mendalam dan menyeluruh tentang potensi dan kondisi pertanian tanaman pangan dan hortikultura Sumatera Selatan saat ini dengan tetap mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Provinsi Sumatera Selatan.

Pada kesempatan ini pula, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan data-data dan masukan sehingga RENSTRA ini dapat diselesaikan dengan baik.

Akhir kata, semoga Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) ini bermanfaat sebagai informasi dan diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan APBD Tahunan Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029.

Palembang,
Kepala Dinas,

2025

Dr. Ir. H. R. Bambang Pramono, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP 19670315 199003 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	v
 BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian TPH	11
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pertanian TPH	11
2.1.2 Sumber Daya Dinas Pertanian TPH	20
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian TPH	24
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Pertanian TPH	32
2.1.5 Mitra Dinas Pertanian TPH	32
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	33
2.2.1 Permasalahan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	33
2.2.2 Isu Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	39

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	44
3.1 Tujuan Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029	44
3.2 Sasaran Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.....	45
3.3 Strategi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam Tahun 2025-2029	46
3.4 Penahapan Pembangunan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam Tahun 2025-2029	47
3.5 Arah Kebijakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam Tahun 2025-2029	49
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	51
4.1 Uraian Program Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	51
4.2 Uraian Kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	51
4.3 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Uraian Program Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	52
4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	71
4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	74
4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	74
BAB V PENUTUP	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	18
Gambar 2	Struktur Organisasi Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	19
Gambar 3	Struktur Organisasi Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	19
Gambar 4	Struktur Organisasi Balai Pelatihan Penyuluhan Pertanian	19
Gambar 5	Struktur Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	21
Tabel 2	Data Pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Golongan Kepegawaian	21
Tabel 3	Data Pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Jabatan	22
Tabel 4	Data Pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin	22
Tabel 5	Data Pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Jabatan Fungsional Tertentu	22
Tabel 6	Aset Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	23
Tabel 7	Perkembangan Luas Panen Padi dan Palawija Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024	25
Tabel 8	Perkembangan Produktivitas Padi dan Palawija Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 – 2024	25
Tabel 9	Perkembangan Produksi Padi dan Palawija Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 – 2024	25
Tabel 10	Perkembangan Luas Panen Tanaman Hortikultura Utama Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 - 2024	28
Tabel 11	Perkembangan Produktivitas Tanaman Hortikultura Utama Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 – 2024	28
Tabel 12	Perkembangan Produksi Tanaman Hortikultura Utama Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 – 2024	28
Tabel 13	Isu Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	30

Tabel 14	Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029	30
Tabel 15	Pentahapan Rencana Strategis Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029	34
Tabel 16	Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan	35
Tabel 17	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra 2025 - 2029 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	36
Tabel 18	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025-2029 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	36
Tabel 19	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	37
Tabel 20	Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	37
Tabel 21	Indikator Kinerja Kunci Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	38
Tabel 22	Isu Strategis Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan	43
Tabel 23	Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029	45
Tabel 24	Penahapan Rencana Strategis Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029	47
Tabel 25	Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan	49
Tabel 26	Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra 2025-2029 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	53
Tabel 27	Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025-2030 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	60

Tabel 28	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	71
Tabel 29	Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	74
Tabel 30	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Sumatera Selatan sejak berabad yang lalu dikenal juga dengan sebutan Bumi Sriwijaya, pada abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi wilayah ini merupakan pusat kerajaan Sriwijaya yang juga terkenal dengan kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Nusantara. Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 (tiga belas) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota, beserta perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sumselprov, 2003).

Sumatera Selatan dikenal sebagai provinsi lumbung pangan yang hingga kini tercatat sebagai daerah penghasil beras terbanyak kelima secara nasional dan produsen kopi terbesar di Indonesia. Sumatera Selatan juga kaya akan sumber daya energi seperti batubara, gas alam, minyak bumi, dan panas bumi. Sumatera Selatan memiliki potensi lahan sawah irigasi, rawa lebak dan pasang surut, dan tadah hujan, sehingga menjadi salah satu provinsi penghasil padi terbesar di Indonesia. Selain padi, Sumatera Selatan juga memproduksi komoditas lain seperti jagung, kacang tanah, ubi kayu, sayuran, dan buah-buahan.

Potensi Provinsi Sumatera Selatan di bidang pertanian dalam arti luas masih sangat terbuka untuk ditingkatkan baik melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan peningkatan efisiensi dan kualitas hasil panen, karena didukung oleh sumber daya lahan dan air yang memadai. Pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang berorientasi pada peningkatan kemampuan petani untuk menuju kemandirian sehingga tingkat pendapatan dan kesejahteraannya semakin meningkat. Pembangunan pertanian di Sumatera Selatan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kontribusi sektor pertanian mempunyai peran yang paling dominan, disisi tenaga kerja sektor ini juga paling dominan dalam penyerapan tenaga kerja, sedangkan dalam mendukung pengentasan kemiskinan kebanyakan jumlah keluarga miskin bermukim di pedesaan dan bermata pencaharian sebagai petani penggarap atau buruh tani, sehingga output di sektor ini secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan keluarga petani penggarap.

Sektor pertanian memiliki kontribusi yang besar dalam pembentukan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Sumatera Selatan. Sektor pertanian ini termasuk ke dalam tiga sektor terbesar yang menyokong PDRB setelah sektor industri pengolahan, serta sektor pertambangan dan penggalian.

Peranan sektor pertanian bukan saja terhadap ketahanan pangan, tetapi juga memberikan andil yang cukup besar terhadap kesempatan kerja. Sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, perkembangan sektor pertanian ke depan harus lebih ditingkatkan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Untuk itu, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang merupakan dokumen perencanaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai Dokumen Perencanaan untuk Periode 5 (lima) Tahun dan Bersifat Indikatif sesuai dengan peran dan tupoksi dinas untuk mendukung visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2029.

Muatan Renstra 2025-2029 Dinas Pertanian TPH merupakan rangkaian kesinambungan dari pelaksanaan Renstra 2024-2026 sehingga tidak bisa lepas dari capaian-capaian yang telah dihasilkan dari perencanaan periode sebelumnya.

Pembangunan di bidang pertanian di Provinsi Sumatera Selatan secara umum telah dan akan terus memberikan sumbangan bagi pembangunan daerah baik secara langsung dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat maupun secara tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain.

Agenda utama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan mendukung visi dan misi Gubernur terpilih diantaranya adalah :

1. Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan pertanian di wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Dokumen ini menterjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan program dan kegiatan yang berkelanjutan, terintegrasi dan konsisten untuk menunjang pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Selatan lima tahun ke depan. Untuk kemudian melakukan review berdasarkan evaluasi setiap tahun, yang dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan Perundang-undangan yang mendasari Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 adalah

sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

- 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
 12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

- Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumsel Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan;
25. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
26. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah;
27. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pendampingan Peningkatan Ekonomi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 adalah menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengendalian dan evaluasi.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 sebagai acuan bagi pimpinan dan staf Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 serta menjamin konsistensi antara perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan setiap tahunnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang*
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan*
- 1.3 Maksud dan Tujuan*
- 1.4 Sistematika Penulisan*

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN

- 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan*
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan*
 - 2.1.2 Sumber Daya Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan*

- 2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
- 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
- 2.1.5 Mitra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan pelayanan
- 2.2 *Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan*
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN

- 3.1 *Tujuan Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029*
- 3.2 *Sasaran Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029*
- 3.3 *Strategi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029*
- 3.4 *Penahapan Pembangunan*
- 3.5 *Penyajian Lokus*
- 3.6 *Arah Kebijakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029*

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 *Uraian Program Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029*
- 4.2 *Uraian Kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029*
- 4.3 *Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029*
- 4.4 *Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah*
- 4.5 *Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)*
- 4.6 *Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)*

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan secara singkat tentang kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1 GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.

Tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan tugas pembantuan di bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura.

Sedangkan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yaitu :

- a. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perbenihan, pengendalian organisme pengganggu tanaman, pengolahan, pemasaran hasil, dan penyuluh pertanian;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perbenihan, pengendalian organisme pengganggu tanaman, pengolahan, pemasaran hasil dan penyuluhan pertanian;
- c. Penyusunan program penyuluhan pertanian;
- d. Penataan prasarana pertanian;
- e. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman serta sarana pertanian;
- f. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;

- g. Pembinaan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan dan hortikultura;
- i. Pembinaan, pengolahan mutu dan pemasaran hasil pertanian;
- j. Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- k. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- l. Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- m. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan menurut Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016, meliputi :

I. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Sedangkan fungsi sekretariat yaitu :

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. Penataan organisasi dan tatalaksana;
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundangan-undangan;
- e. Pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

II. Bidang Tanaman Pangan

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman pangan.

Fungsi Bidang Tanaman Pangan yaitu:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan penanganan pasca panen;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman pangan dan penanganan pasca panen;
- c. Pelaksanaan penyusunan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya dan penanganan pasca panen tanaman pangan;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang budidaya dan penanganan pasca panen tanaman pangan;
- f. Pelaksanaan evaluasi capaian kinerja dan pelaporan di bidang budidaya dan penanganan pasca panen tanaman pangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

III. Bidang Hortikultura

Bidang Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi, produktivitas dan pasca panen hortikultura.

Fungsi bidang Hortikultura yaitu :

- a. Perencanaan pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan penanganan pasca panen hortikultura;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang hortikultura;
- c. Pelaksanaan penyusunan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang hortikultura;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya dan penanganan pasca panen hortikultura;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang budidaya dan penanganan pasca panen hortikultura;
- f. Pelaksanaan evaluasi capaian kinerja dan pelaporan di bidang budidaya dan penanganan pasca panen hortikultura; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

IV. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.

Fungsi bidang Prasarana dan Sarana Pertanian yaitu :

- a. Perencanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- c. Pelaksanaan penyusunan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- d. Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- e. Pengembangan potensi dan pengolahan lahan dan air irigasi di bidang pertanian;
- f. Penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida serta alat mesin pertanian;
- g. Pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan.

V. Bidang Pengolahan Pemasaran Hasil dan Penyuluhan Pertanian

Bidang Bidang Pengolahan Pemasaran Hasil dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan pemasaran hasil dan penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengolahan Pemasaran Hasil dan Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengolahan, pemasaran hasil, dan penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan, pemasaran hasil, dan penyuluhan pertanian;
- c. Pelaksanaan penyusunan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pengolahan, pemasaran hasil dan penyuluh pertanian.

- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengolahan, pemasaran hasil, dan penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengolahan, pemasaran hasil, dan penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- f. Pelaksanaan evaluasi capaian kinerja dan pelaporan di bidang pengolahan, pemasaran hasil, dan penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2018 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang yang bersifat pelaksanaan di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, di bidang pelatihan penyuluhan pertanian, di bidang pengembangan dan produksi benih tanaman pangan dan hortikultura serta bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Uraian Tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas yaitu :

1. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;

UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pembinaan dan penerapan teknologi serta operasional pengendalian organisme pengganggu tanaman dan pemantauan penggunaan pestisida.

Untuk melaksanakan tugas, UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan wilayah pengamatan dan penetapan diagnosa organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura spesifik lokasi.
- b. Penyusunan penerapan rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura;
- c. Penyusunan rencana pemantauan penggunaan pestisida;
- d. Penyusunan rencana pelaksanaan pengamatan dan pendataan tanaman yang mengalami kerusakan dan fuso baik terkena

serangan hama /penyakit maupun terkena bencana alam, banjir, dan kekeringan;

- e. Pembinaan instalasi laboratorium pengamatan hama dan penyakit serta instalasi brigade proteksi tanaman;
- f. Penyusunan pelaksanaan program, pembinaan, evaluasi dan pelaporan;
- g. Perencanaan operasional perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- h. Pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional;
- i. Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. UPTD Balai Pelatihan Penyuluhan Pertanian;

UPTD Balai Pelatihan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pertanian di wilayah kerja melalui pendidikan dan pelatihan pertanian, penyediaan sarana dan prasarana, transfer teknologi dan atau bentuk kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pelatihan penyuluhan pertanian.

Untuk melaksanakan tugas, UPTD Balai Pelatihan Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kegiatan pelatihan pertanian bagi aparatur dan non aparatur untuk sektor pertanian dan atau pelatihan lainnya melalui kerjasama pihak lain;
- b. Penyusunan transfer teknologi pertanian;
- c. Penyusunan sarana dan prasarana pelatihan pertanian;
- d. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
- e. Penyusunan data dan informasi sumber daya manusia pertanian di wilayah kerjanya;
- f. Penyusunan rencana kebutuhan pelatihan di bidang pertanian;
- g. Pelaksanaan pengelolaan pelaporan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
- h. Penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala;
- i. Perencanaan operasional pelatihan penyuluhan pertanian;
- j. Pembagian tugas kepada kepala Subbagian, Kepala Seksi dan pelaksana serta fungsional;
- k. Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.

UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan peredaran dan pengawasan mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.

Untuk melaksanakan tugas, UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan, perencanaan, pengawasan mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
- b. Penyusunan program, pembinaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Penyiapan pelaksanaan pengawasan peredaran dan perizinan benih tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Penilaian varietas, kultivar dan pelayanan sertifikasi;
- e. Perencanaan operasional pengawasan dan sertifikasi benih;
- f. Pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan pelaksana serta Fungsional;
- g. Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas yang diberikan pimpinan.

4. UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

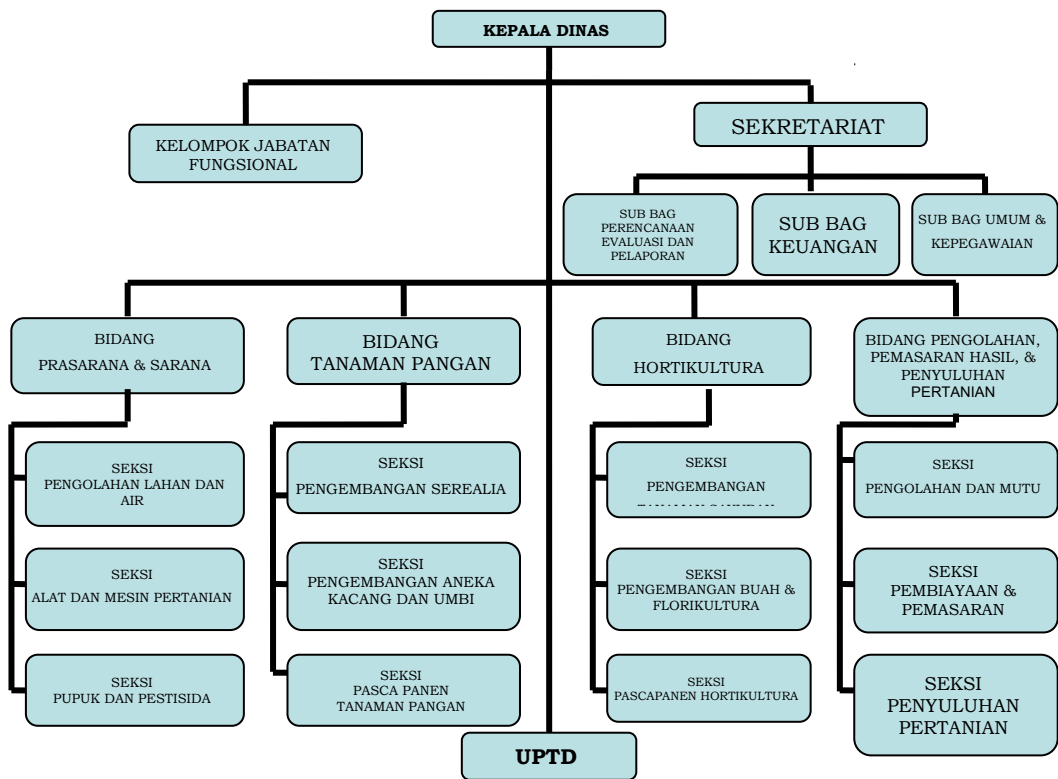
UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan perbanyakan benih dan penyebarluasan benih bermutu varietas unggul bersertifikat kelas benih dasar, kelas benih pokok dan kelas benih sebar serta membina dan menumbuhkan kelompok penangkar dan inovasi teknologi di bidang perbenihan tanaman pangan dan hortikultura.

Untuk melaksanakan tugas, UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan pelaksanaan produksi benih dasar, benih pokok dan benih sebar pada instalasi balai benih induk dan penangkar/produsen benih;

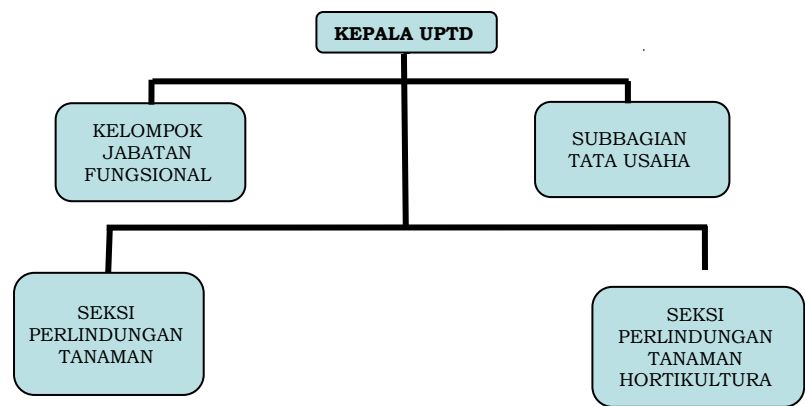
- b. Pembinaan teknis kepada instalasi balai benih induk, balai benih utama dan kebun benih serta penangkar/produsen benih;
- c. Penyusunan penyiapan pelaksanaan inovasi teknologi di bidang perbenihan tanaman pangan dan hortikultura serta sebagai sumber informasi perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Penyusunan penyiapan pelaksanaan penyusunan program, pembinaan dan evaluasi;
- e. Penyusunan penyiapan pelaksanaan pengumpulan (koleksi) varietas/klon tanaman pangan dan hortikultura yang sudah di lepas dan plasma nutfah komoditi tanaman pangan dan hortikultura khas provinsi;
- f. Perencanaan operasional pengembangan dan produksi benih tanaman pangan dan hortikultura;
- g. Pembagian tugas kepada kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Pelaksana serta Fungsional;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan struktur organisasi sebagaimana Gambar 1 berikut ini :

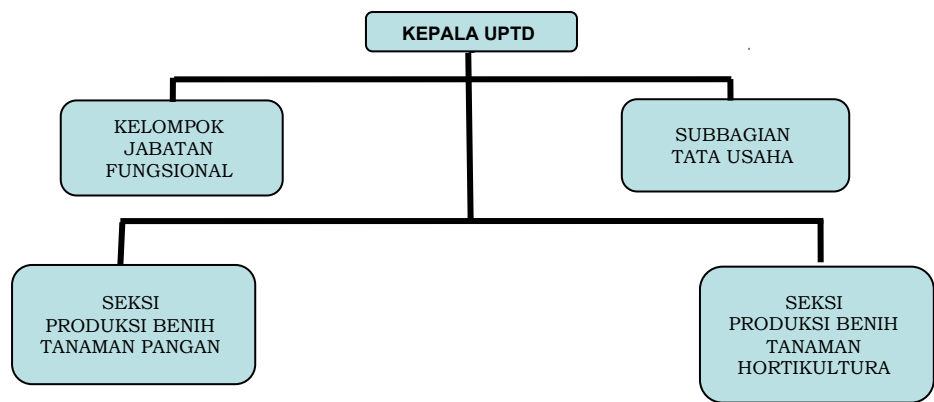


Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan

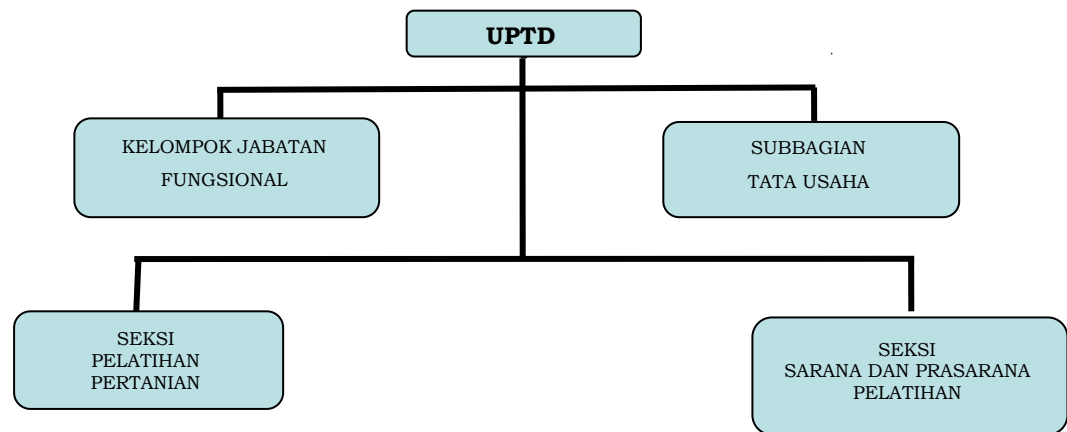
Sedangkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan struktur organisasi UPTD sebagai berikut :



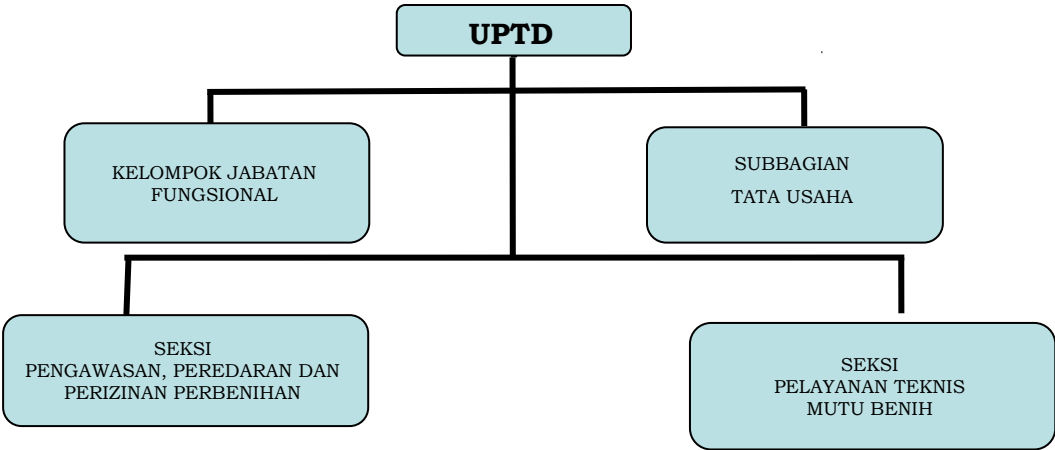
Gambar 2. Struktur Organisasi UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura



Gambar 3. Struktur Organisasi UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura



Gambar 4. Struktur Organisasi Balai Pelatihan Penyuluhan Pertanian



Gambar 5. Struktur Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

2.1.2 Sumber Daya Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mewujudkan visi misi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan maka diperlukan ketersediaan sumber daya pembangunan yang memadai. Pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta sumber daya penunjang/ pendukung lainnya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal. Kondisi ketersediaan sumber daya manusia dan sarana pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut :

I. Organisasi dan Kepegawaian

a. Organisasi Dinas

Pejabat struktural dalam organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 37 jabatan, terdiri dari : seorang Pejabat Eselon II.a (Kepala Dinas), Pejabat Eselon III.a (Sekretaris, Kepala Bidang) dan Pejabat Eselon III.b (Kepala Balai/UPTD) sebanyak 9 orang, dan Pejabat Eselon IV.a (Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi) sebanyak 27 orang.

b. Kepegawaian

Pegawai di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan sampai Juni 2025 berjumlah 376 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebanyak 144 orang. Data kepegawaian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, golongan pegawai dan jenis jabatan. Rincian dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1. Data Pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Sekolah Dasar	4
2.	Sekolah Menengah Pertama	-
3.	Sekolah Menengah Atas	104
4.	Diploma 1	-
5.	Diploma 2	-
6.	Diploma 3	14
7.	Sarjana Strata 1	193
8.	Pasca Sarjana Strata 2	59
9.	Pasca Sarjana Strata 3	2
Jumlah Total Pegawai		376

Sumber : Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumsel Tahun 2025

Tabel 2. Data Pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Golongan Kepegawaian

PEGAWAI NEGERI SIPIL

No	Golongan	Jumlah Total (Orang)
1.	Golongan I	1
2.	Golongan II	30
3.	Golongan III	160
4.	Golongan IV	41
Jumlah		232

Sumber : Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumsel Tahun 2025

PPPK

No	Golongan	Jumlah Total (Orang)
1.	Golongan I	4
2.	Golongan II	-
3.	Golongan III	-
4.	Golongan IV	-
5.	Golongan V	48
6.	Golongan VI	-
7.	Golongan VII	11
8.	Golongan VIII	-
9.	Golongan IX	81
Jumlah		144

Sumber : Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumsel Tahun 2025

Tabel 3. Data Pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Jabatan

No	Jenis Jabatan	Golongan	Jumlah (Orang)
1.	Struktural	Ess II	1
		Ess III	9
		Ess IV	27
Jumlah			37

Sumber : Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumsel Tahun 2025

Tabel 4. Data Pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1.	Laki-laki	215
2.	Perempuan	161
Jumlah		376

Sumber : Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumsel Tahun 2025

Tabel 5. Data Pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Untuk Jenis Jabatan Fungsional Tertentu

No	Jabatan Fungsional	Jumlah PNS (Orang)	Jumlah PPPK (Orang)
1.	Penyuluh Pertanian	21	27
2.	POPT	29	-
3.	PBT	24	-
4.	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian	5	-
Jumlah		79	27

Sumber : Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumsel Tahun 2025

II. Aset/Modal

Aset milik lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan yang dikelola meliputi : bangunan gedung kantor, gudang dan fasilitas lainnya, perlengkapan kantor, mesin dan alat pertanian, dan tanah. Secara rinci tertera pada tabel berikut ini :

Tabel 6. Aset Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan

No.	Uraian	Jumlah
1	Tanah	
	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	129.109 M ²
	Tanah Bangunan Mess/ Wisma/ Asrama	9.963 M ²
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	331.421,72 M ²
	Tanah Bangunan Laboratorium	4.805 M ²
	Tanah Persil Lainnya	419 M ²
	Tanah Perkebunan Lainnya	164.940,83 M ²
	Tanah Lapangan Tennis	6.371 M ²
2	Peralatan dan Mesin	
	Alat Besar	368 Unit
	Komputer	442 Unit
	Peralatan Olah Raga	18 Unit
	Alat Angkutan	159 Unit
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	129 Unit
	Alat Pertanian	285 Unit
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.865 Unit
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	146 Unit
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	70 Unit
	Alat Laboratorium	118 Unit
	Alat Persenjataan	3 Unit
3	Gedung dan Bangunan	
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	7.827,75 M ²
	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	- M ²
	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	3.346 M ²
	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	60 M ²
	Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen	- M ²
	Bangunan Gudang Lain-Lain	3.714 M ²
	Bangunan Bengkel/ Hanggar Permanen	380 M ²
	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	36 M ²
	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	1.281,5 M ²
	Bangunan Gedung Laboratorium Semi Permanen	200 M ²
	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-Lain (dst)	- M ²
	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	148 M ²
	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	212 M ²

	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	475	M ²
	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	741	M ²
	Gedung Garasi/ Pool Permanen	230,5	M ²
	Bangunan untuk Kandang	836	M ²
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	-	M ²
	Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain (dst)	232	M ²
	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120	M ²
	Mess/ Wisma/ Bungalow/ Tempat Peristirahatan Permanen	387	M ²
	Asrama Permanen	5.661,5	M ²
	Flat/ Rumah Susun Permanen	135	M ²
	Flat/ Rumah Lain-Lain (dst)	4.016	M ²
	Pagar Permanen	-	M ²
4	Jalan Irigasi Jaringan (Jalan dan Jembatan)		
	Jalan Khusus Kompleks	1.125	M ²
	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	45	M ²
5	Aset Tetap Lainnya		
	Bahan Perpustakaan	25	Unit
	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olah Raga	1	Unit

Sumber : Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumsel Per 31 Desember 2021

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan

I. Gambaran Produksi Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Adapun gambaran kondisi aktual pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan yang telah dilaksanakan dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan
- Luas panen merupakan luas lahan yang ditanami serta menghasilkan produksi. Capaian luas panen, produktivitas dan produksi untuk 4 (empat) tanaman pangan utama yang meliputi : padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar, secara rinci sebagai berikut :

Tabel 7. Perkembangan Luas Panen Padi dan Palawija Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 – 2024

No	Komoditas	Luas Panen (Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi	551.321	496.242	513.378	504.143	521.092
2	Jagung	137.249	148.677	142.543	132.582	126.560
3	Kedelai	675	254	30	33,30	577,15*
4	Kacang Tanah	1.495,60	1.238	1.034	1.012,00	796,95*
5	Kacang Hijau	627,40	528	280,50	277,10	196,14*
6	Ubi Kayu	4.350,60	7.963,2	6.717,40	5.062,90	4.076,94*
7	Ubi Jalar	984,20	1.160,8	1.206,10	1.164,30	974,86*

Keterangan : *) Angka Sementara (ASEM) BPS Tahun 2024
Sumber : Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 8. Perkembangan Produktivitas Padi dan Palawija Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 – 2024

No	Komoditas	Produktivitas (Ku/Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi	49,75	51,44	54,06	56,19	55,83
2	Jagung	67,60	64,17	71,05	62,36	65,89
3	Kedelai	15,80	15,81	13,28	14,65	14,99*
4	Kacang Tanah	15,58	13,83	14,42	15,47	13,97*
5	Kacang Hijau	7,23	6,07	7,47	8,54	7,18*
6	Ubi Kayu	356,22	385,63	360,32	365,16	359,60*
7	Ubi Jalar	265,75	245,04	247,83	240,27	236,01*

Keterangan : *) Angka Sementara (ASEM) BPS Tahun 2024
Sumber : Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 9. Perkembangan Produksi Padi dan Palawija Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 – 2024

No	Komoditas	Produksi (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi	2.743.060	2.552.443	2.775.069	2.832.774	2.909.412
2	Jagung	927.757	954.025	1.012.791	826.836	833.952
3	Kedelai	1.066	402	39	48,8	865*
4	Kacang Tanah	2.331	1.712	1.490,93	1.566,01	1.113,54*
5	Kacang Hijau	453,40	320,40	209,40	219,51	140,87*
6	Ubi Kayu	154.975	307.088,1	242.043,86	184.874,55	146.607,02*
7	Ubi Jalar	26.155,24	28.444,21	29.891,08	27.974,34	23.007,23*

Keterangan : *) Angka Sementara (ASEM) BPS Tahun 2024
Sumber : Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan

Dari beberapa komoditi tanaman pangan tersebut, terdapat 3 (tiga) komoditi yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2020 sampai 2024. Komoditi tersebut adalah padi, jagung dan kedelai. Indikator yang menjadi tolak ukurnya adalah jumlah produksi dan persentase peningkatan produksi,

dimana produksi dan produktivitas khususnya padi tahun 2020-2024 mengalami trend peningkatan yang cukup signifikan.

Pada tahun 2022, Provinsi Sumatera Selatan mencatatkan angka produktivitas sebesar 54,06 kuintal/hektar dan untuk pertama kalinya melampaui angka nasional yang saat itu berada di 52,49 kuintal/hektar. Peningkatan yang paling mencolok terjadi di tahun 2021 dan 2022, di mana produktivitas padi Sumsel melonjak dari 51,44 menjadi 54,06 kuintal/hektar. Peningkatan ini berlanjut hingga mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar 56,19 kuintal/hektar, sebelumnya sedikit menurun menjadi 55,83 kuintal/hektar di tahun 2024. Sementara itu, angka produktivitas nasional juga mengalami kenaikan, namun dengan laju yang lebih lambat.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Sumsel tidak hanya berhasil meningkatkan produktivitas padi secara konsisten, tetapi juga berhasil melampaui angka produktivitas nasional sejak tahun 2022. Hal ini mengindikasikan keberhasilan berbagai upaya peningkatan pertanian yang dilakukan di wilayah tersebut.

Keberhasilan ini salah satunya dikarenakan adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa perekrutan Petugas Pendamping Ekonomi Pertanian (PPEP) di tahun 2020 sebanyak 1.000 orang dan di tahun 2021 sebanyak 400 orang, serta adanya peningkatan penyediaan bantuan benih dan saprodi padi sebanyak 10.000 ha di tahun 2023 dan 2.500 ha di tahun 2024. Dukungan tersebut teralokasi hampir setengah dari total pagu anggaran di Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, bantuan juga didapat dari program/kegiatan yang bersumber dari Dana APBN melalui Dana Tugas Pembantuan Provinsi.

Adanya Petugas Pendamping Ekonomi Pertanian (PPEP) ini menjadi solusi bagi pemerintah dalam mengakomodir 1 (satu) Desa 1 (satu) Penyuluh Pertanian di Provinsi Sumatera Selatan. PPEP yang berjumlah 1.400 orang ini bertugas di 17 kab/kota di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan. PPEP bertugas melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian kepada petani dan kelompok tani

dalam rangka mengawal program peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Petugas PPEP tersebut yang mengawal dan mendampingi para petani di kab/kota baik dari sisi penyuluhan pertanian, pengawasan benih tanaman, maupun dari perlindungan tanaman padi terhadap hama penyakit tumbuhan.

Komoditi padi merupakan komoditi utama di Provinsi Sumsel dan menjadi salah satu penyumbang swasembada pangan nasional. Hal ini dikarenakan dari sisi produksi, Provinsi Sumatera Selatan masuk ke dalam 5 (lima) besar Provinsi dengan jumlah produksi terbanyak setelah Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Selain tanaman padi, terdapat beberapa komoditas tanaman pangan yang diusahakan di Provinsi Sumatera Selatan.

Pertumbuhan produktivitas tanaman palawija pada tahun 2024 seperti komoditi Jagung juga mengalami peningkatan dari 62,36 kuintal/hektar pada tahun 2023 menjadi 65,89 kuintal/hektar pada tahun 2024, meningkat 5,67%; Kedelai meningkat 2,30%; Kacang Tanah mengalami penurunan 9,72%; Kacang Hijau turun 15,88%; Ubi Kayu turun 1,52%; dan Ubi Jalar turun 1,77% jika dibandingkan tahun sebelumnya pada 2023. Sebaran komoditas pangan seperti padi, dan jagung masih terkonsentrasi di beberapa wilayah yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Ogan Komering Ulu Timur. Selain itu, adanya perubahan iklim memberikan ancaman pada potensi gagal panen dengan adanya perubahan curah hujan dan potensi cuaca ekstrim. Oleh karena itu perlu dilakukan diversifikasi sektor pertanian untuk menjaga ketahanan pangan.

2) Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Hortikultura

Komoditas hortikultura yang dibudidayakan di Provinsi Sumatera Selatan sangatlah banyak. Komoditas hortikultura ini terdiri dari sayuran, buah, biofarmaka dan tanaman hias. Tanaman utama untuk komoditas sayuran adalah cabe merah, dan bawang merah. Tanaman utama buah adalah jeruk

siam/keprok, durian, duku, alpukat dan nanas. Tanaman utama biofarmaka adalah jahe, kunyit dan lengkuas. Sedangkan tanaman utama tanaman hias adalah krisan dan sedap malam. Perkembangan produksi, produktivitas dan luas panen tanaman hortikultura utama dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 10. Perkembangan Luas Panen Tanaman Hortikultura Utama Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 – 2024

No	Komoditas	Luas Panen (Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jeruk Siam	1.113,12	1.624,89	1.229,33	1.152,57	1.108,69
2	Durian	4.487,10	6.138,99	3.712,38	4.088,93	7.379,02
3	Duku	3.455,05	5.074,54	1.946,65	2.258,96	6.089,11
4	Alpukat	2.242,53	2.505,73	2.487,53	2.921,12	1.226,24
5	Nenas	1.642,85	1.679,58	1.762,09	1.845,11	1.635,81
6	Bawang Merah	139,75	193,75	179,90	164,51	118,32
7	Cabe Besar	4.202,82	4.875,84	4.492,28	3.728,12	4.000,96

Sumber : Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 11. Perkembangan Produktivitas Tanaman Hortikultura Utama Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 – 2024

No	Komoditas	Produktivitas (Ku/Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jeruk Siam	504,08	441,12	361,73	372,72	619,74
2	Durian	67,60	75,43	109,40	97,02	126,79
3	Duku	154,55	132,97	90,27	67,85	87,93
4	Alpukat	162,06	63,56	213,66	202,38	72,11
5	Nenas	836,13	2.834,48	3.218,45	2.587,53	1.757,69
6	Bawang Merah	68,04	58,04	62,81	72,76	75,77
7	Cabe Besar	67,80	48,31	56,76	40,96	43,96

Sumber : Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 12. Perkembangan Produksi Tanaman Hortikultura Utama Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020–2024

No	Komoditas	Produksi (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jeruk Siam	56.110,14	71.677,74	44.468,03	42.958,12	68.709,15
2	Durian	30.334,08	46.309,38	40.615,29	39.670,69	93.560,92
3	Duku	53.398,53	67.475,50	17.572,77	15.326,32	53.540,04
4	Alpukat	36.343,26	15.926,92	53.148,57	59.117,72	8.842,43
5	Nenas	137.363,38	476.074,10	567.120,17	477.429,63	287.523,84
6	Bawang Merah	950,90	1.124,56	1.129,89	1.197,02	896,50
7	Cabe Besar	28.496,89	23.555,63	25.497,33	15.270,21	17.588,46

Sumber : Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan

Dari beberapa komoditi tanaman hortikultura tersebut, terdapat 7 (tujuh) komoditi yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2020 sampai tahun 2023, namun di tahun 2024 hanya 4 (empat) komoditas yang menjadi IKU Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan.

Dari beberapa komoditi yang menjadi IKU Dinas, komoditi cabe besar dan bawang merah merupakan komoditi strategis. Hal ini dikarenakan komoditi tersebut merupakan komoditi yang berkaitan langsung dengan penyumbang inflasi. Jika dilihat dari produksi, capaian dari kedua komoditi tersebut berfluktuatif. Dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pertanian TPH telah diberikan setiap tahunnya berupa pengembangan tanaman cabe dan bawang merah di beberapa lokasi sentra dan adanya Gerakan Sumber Mandiri Pangan (GSMP) yang diinisiasi oleh Gubernur Sumatera Selatan.

Untuk komoditi buah-buahan dalam beberapa tahun ini belum banyak tersentuh dengan kegiatan dan bantuan. Petani buah-buahan hanya mengandalkan musim dan cuaca serta swadaya petani. Buah-buahan unggulan di Provinsi Sumatera Selatan berupa duku dan durian banyak yang telah berusia tua, sehingga faktor alam menjadi faktor penentu keberhasilan produksi dan produktivitas komoditi buah-buahan.

Dari beberapa penjelasan di atas terkait dengan kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, maka dapat direkapitulasi capaian kinerja tersebut sebagaimana terlihat pada Tabel 13 di bawah ini.

Tabel 13. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Meningkatkan Produksi Sektor Unggulan Pertanian			Produksi Tanaman Pangan :															
				- Padi (Ton)	5.325.825	5.450.825	3.543.061	3.943.061	2.846.938	2.743.060	2.552.443	2.775.069	2.832.774	2.909.412	51,50	46,83	78,32	71,84	102,19
				- Jagung (Ton)	1.136.025	1.164.426	943.537	963.375	768.706	927.757	954.025	1.012.791	826.836	833.952	81,67	81,93	107,34	85,83	108,49
				- Kedelai (Ton)	15.084	15.234	2.861	2.909	34.65	1.066	402	39	48,8	865	7,07	2,64	1,36	1,68	2.496,4
				Produksi Tanaman Hortikultura :															
				- Cabe (Ton)	47.319	48.986	23.419	24.303	15.285	28.496,89	23.555,63	25.497,33	15.270,21	17.588,46	60,22	48,09	108,87	62,83	115,07
				- Bawang Merah (Ton)	2.072	2.321	571	710	1.198	950,90	1.124,56	1.129,89	1.197,02	896,50	45,89	48,45	197,88	168,59	74,83
				- Jeruk (Ton)	42.414	43.822	43.437	53.517	43.482	56.110,14	71.677,74	44.468,03	42.958,12	68.709,15	132,29	163,57	102,37	80,27	158,02
				- Nanas (Ton)	136.599	137.965	138.188	138.412	483.254	137.363,38	476.074,10	567.120,17	477.429,63	287.523,84	100,56	345,07	410,40	344,93	59,50

Untuk mencapai target Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura antara Tahun 2020-2024, alokasi anggaran yang telah terealisasi dalam Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 14 di bawah ini.

Tabel 14. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

Uraian TA 2020	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.867.400.000	-	-	-	-	4.975.496.587	-	-	-	-	84,80	-	-	-	-	4,9	84,80
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	46.961.725.500	49.480.195.065	51.111.933.714	48.542.973.251	-	43.436.790.524	46.330.375.498	48.088.937.724	46.054.144.187	-	92,49	93,63	94,09	99,79	-	95
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	605.700.000	-	-	-	-	525.898.100	-	-	-	-	86,82	-	-	-	-	-	86,82
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	-	1.400.500.000	21.108.230.596	32.585.457.700	9.352.158.816	-	1.278.794.950	20.952.954.201	31.727.853.898	8.785.650.249	-	91,31	99,26	97,37	100	-	96,99
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	200.000.000	-	-	-	-	199.112.000	-	-	-	-	99,56	-	-	-	-	-	99,56
Program Penyediaan	-	2.868.054.000	403.961.500	16.268.624.500	2.698.558.000	-	2.389.574.066	-	5.328.952.336	2.255.793.950	-	83,32	76,19	32,76	100	-	73,07

Dan Pengembangan Prasarana Pertanian																	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	87.224.000	-	-	-	-	74.368.000	-	-	-	-	85,26	-	-	-	-	-	85,26
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	-	-	235.000.000	500.000.000	340.000.000	-	-	230.865.500	498.661.355	312.549.133	-	-	98,24	99,73	100	-	99,32
Program Penyuluhan Pertanian	-	27.422.340.500	35.634.832.250	32.944.500.000	30.108.200.000	-	25.640.907.866	35.271.081.225	32.156.261.759	30.025.457.000	-	93,50	98,98	97,61	100	-	97,52
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	398.600.000	-	-	-	-	377.594.450	-	-	-	-	94,73	-	-	-	-	-	94,73
Program Peningkatan Produksi dan Pelayanan Usahatani melalui <i>Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project</i> (IPDMIP)	1.668.692.000	-	-	-	-	1.294.869.451	-	-	-	-	77,60	-	-	-	-	-	77,60
Program Peningkatan Luas Lahan Siap Tanam	600.000.000	-	-	-	-	596.805.600	-	-	-	-	99,47	-	-	-	-	-	99,47
Program Penerapan Teknologi Tanaman Pangan	72.000.000	-	-	-	-	71.467.650	-	-	-	-	99,26	-	-	-	-	-	99,26
Program Penerapan Teknologi Tanaman Hortikultura	412.732.925	-	-	-	-	409.877.670	-	-	-	-	99,31	-	-	-	-	-	99,31
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh Pertanian	3.501.250.000	-	-	-	-	3.435.615.217	-	-	-	-	98,13	-	-	-	-	-	98,13
Program Ketersediaan Sarana Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.189.950.000	-	-	-	-	1.039.961.605	-	-	-	-	87,40	-	-	-	-	-	87,40
Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	20.700.000	-	-	-	-	19.069.750	-	-	-	-	92,12	-	-	-	-	-	92,12

Berdasarkan tabel di atas, terjadi perubahan nomenklatur pada program di tahun 2021-2024 dibandingkan dengan tahun 2020. Jika dilihat dari masing-masing program, pagu anggaran cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Secara umum, hal ini dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah. Untuk itu, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas, khususnya dalam rangka menjaga produksi komoditi pertanian, khususnya padi. Oleh karena itu, di tahun 2022 ada peningkatan drastis terhadap Pagu Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian. Selain itu, sejak tahun 2021 terdapat alokasi anggaran pembayaran gaji Petugas Pendamping Ekonomi Pertanian (PPEP) yang berjumlah 1.400 orang yang tersebar di 17 kabupaten / kota.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan

Adapun kelompok sasaran dalam pemberian pelayanan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan adalah kelompok tani, unit pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura, dan pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Semua bantuan yang berasal dari dukungan APBD dan APBN yang ditujukan untuk kesejahteraan petani melalui kelompok tani di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang terdaftar di dalam aplikasi SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian) dan diusulkan melalui e-Proposal maupun proposal langsung.

Unit Pengolahan Hasil (UPH) merupakan para pelaku usaha binaan yang tergabung dalam kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Biasanya mereka mendapat bantuan fasilitasi peralatan pengolahan, bangunan serta bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan daya saing dan nilai tambah. Sedangkan untuk kelompok sasaran pegawai dinas sendiri berupa pelayanan dalam urusan gaji, kenaikan pangkat, mutasi, dan urusan kepegawaian lainnya.

2.1.5 Mitra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan memiliki beberapa mitra, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan, Kodam II Sriwijaya Palembang, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Provinsi Sumatera Selatan, dan Universitas Sriwijaya Palembang, serta mitra lainnya. Koordinasi dan Kolaborasi selalu dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dan mitra-mitra tersebut agar tetap saling bersinergi.

BPS Provinsi Sumatera Selatan berperan dalam penghitungan angka produksi komoditi tanaman pangan dan hortikultura. BPS Provinsi Sumatera Selatan bersama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan bersama-sama mengawal ketercapaian target produksi komoditi tanaman pangan dan hortikultura, terutama komoditi padi. Peran TNI juga besar dalam ketercapaian target pelaksanaan optimasi lahan dan cetak sawah yang menjadi prioritas Presiden terpilih dalam meningkatkan ketahanan pangan. Koordinasi juga dilaksanakan dengan BMKG Provinsi Sumatera Selatan melalui Stasiun Klimatologi Kelas I Sumatera Selatan. Koordinasi yang dilakukan dalam memprediksi prakiraan cuaca dan iklim terkait dengan musim tanam komoditi tanaman pangan dan hortikultura. Universitas Sriwijaya Palembang juga bermitra dengan Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan dalam pendampingan/ pengembangan/ keberlanjutan Program Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/ *Food Estate* berbasis korporasi.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan

Tantangan pembangunan pangan dan pertanian Indonesia, yaitu: terbatasnya sumber daya alam, perubahan iklim global, dominasi usahatani skala kecil, dan proporsi kehilangan hasil panen dan pemborosan pangan masih cukup tinggi. Sumatera Selatan dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki berbagai komoditas unggulan. Beberapa komoditas utama yang dihasilkan Sumatera Selatan meliputi kopi, karet, kelapa sawit, minyak bumi, gas alam, batu bara, dan padi.

Selain itu, potensi lahan rawa mineral Provinsi Sumatera Selatan terluas se-Indonesia yaitu sebesar 2,1 juta hektar yang terdiri dari 0,885 juta hektar rawa pasang surut dan 1,246 juta hektar rawa lebak. Merujuk kepada prioritas pemerintah pusat dimana Lahan Rawa Mineral Sumsel

ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Permenko Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024; Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 yang memuat 77 Proyek Strategis nasional (PSN), dimana point ke-7 (tujuh) nya adalah “Pengembangan Lumbung Pangan : Pengembangan *Food Estate* di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Papua Selatan”, serta mengacu kepada Asta Cita ke-2 (dua) Pemerintahan Prabowo-Gibran “Memantapkan sistem pertahanan, keamanan negara, dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, ekonomi biru. Semua itu menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan untuk menjadi salah satu penyangga ketahanan pangan Negara Indonesia.

Potensi besar khususnya di sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, serta penetapan program prioritas pusat yang menjadi tantangan terdapat beberapa permasalahan dalam mempertahankan perannya sebagai lumbung pangan, antara lain :

✓ **Rendahnya Indeks Pertanaman Tanaman Padi**

Tabel 15. Indeks Pertanaman Padi Tahun 2021-2024

NO.	KABUPATEN/ KOTA	Indeks Pertanaman (IP)			
		2021	2022	2023	2024
1	Muara Enim	0.89	0.92	0.87	0.95
2	Musi Rawas	1.61	1.42	1.48	1.57
3	Empat Lawang	1.21	0.98	1.17	1.02
4	Pagar Alam	0.97	1.06	1.28	1.31
5	Lubuk Linggau	1.65	1.19	1.23	1.55
6	OKU Timur	1.69	1.91	1.89	1.97
7	OKU	0.75	0.82	0.81	0.74
8	Muratar	1.36	1.37	1.25	1.24
9	Banyuasin	1.12	1.07	1.07	1.12
10	OKU Selatan	1.13	1.03	1.16	1.12
11	Musi Banyuasin	0.96	0.90	0.81	0.76
12	Ogan Ilir	0.63	0.72	0.74	0.70
13	Prabumulih	0.14	0.14	0.13	0.18
14	OKI	0.92	1.06	0.97	1.06
15	Palembang	0.76	0.73	0.96	0.82
16	Pali	1.11	1.52	1.65	1.75
17	Lahat	1.15	1.21	1.13	1.05
Jumlah		1.11	1.15	1.13	1.17

Jika dilihat pada Tabel 15, Indeks Pertanaman Tanaman Padi di Provinsi Sumatera Selatan masih rendah antara 1,11-1,17 kurun waktu 2021-2024. Hal ini menunjukkan bahwa dalam satu tahun, satu hektar lahan padi hanya dapat ditanami sebanyak 1,11 atau 1,17 kali atau 1 kali ditambah 11% atau 17% lagi dari satu kali penanaman penuh. Hal ini menjadi tantangan bagi pertanian di Provinsi Sumatera Selatan untuk memberikan solusi supaya petani dapat meningkatkan indeks pertanaman padi mereka, yang salah satunya sedang dilaksanakan di Tahun 2024 dan 2025 yaitu melalui Optimalisasi Lahan.

✓ **Kecendrungan Konversi Lahan Pertanian ke Non Pertanian**

Adanya indikasi lahan pertanian semakin berkurang di Provinsi Sumatera Selatan akibat kecendrungan konversi lahan pertanian pangan untuk industri, perkebunan, dan permukiman.

Tabel 16. Luas Baku Sawah, LP2B dan IP Tahun 2024 Provinsi Sumatera Selatan

NO.	KABUPATEN/ KOTA	LBS (Ha)	LP2B (Ha)*	Selisih LBS dan LP2B (Ha)
1	Muara Enim	19,527	16,512.54	3,014.46
2	Musi Rawas	14,969	21,635.92	(6,666.92)
3	Empat Lawang	9,432	11,562.00	(2,130.00)
4	Pagar Alam	3,088	1,392.66	1,695.34
5	Lubuk Linggau	1,129	857.19	271.81
6	OKU Timur	66,624	52,285.84	14,338.16
7	OKU	3,561	-	-
8	Muratara	2,201	3,296.29	(1,095.29)
9	Banyuasin	189,345	104,973.00	84,372.00
10	OKU Selatan	8,821	6,521.00	2,300.00
11	Musi Banyuasin	38,051	33,809.66	4,241.34
12	Ogan Ilir	34,787	30,934.55	3,852.45
13	Prabumulih	165	94.71	70.29
14	OKI	105,436	75,424.28	30,011.72
15	Palembang	3,295	1,014.17	2,280.83
16	Pali	6,399	3,619.00	2,780.00
17	Lahat	12,652	12,000.00	652.00
Jumlah		519,482.00	375,932.81	143,549.20

*) Data per tanggal 06 Oktober 2023

Jika dilihat dari tabel di atas, masih banyak kabupaten/ kota yang belum melakukan pengesahan luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui peraturan daerah/ peraturan bupati. Hal ini cenderung

membuka peluang untuk terjadinya konversi lahan (alih fungsi lahan) dari lahan pertanian pangan ke sektor lain.

✓ **Lahan Sawah belum termanfaatkan secara optimal**

Tabel 17. Luas Baku Sawah, IP Tahun 2024 Provinsi Sumatera Selatan

NO.	KABUPATEN/ KOTA	LBS (Ha)	IP (2024)
1	Muara Enim	19,527	0.95
2	Musi Rawas	14,969	1.57
3	Empat Lawang	9,432	1.02
4	Pagar Alam	3,088	1.31
5	Lubuk Linggau	1,129	1.55
6	OKU Timur	66,624	1.97
7	OKU	3,561	0.74
8	Muratara	2,201	1.24
9	Banyuasin	189,345	1.12
10	OKU Selatan	8,821	1.12
11	Musi Banyuasin	38,051	0.76
12	Ogan Ilir	34,787	0.70
13	Prabumulih	165	0.18
14	OKI	105,436	1.06
15	Palembang	3,295	0.82
16	Pali	6,399	1.75
17	Lahat	12,652	1.05
Jumlah		519,482.00	1.17

Dari tabel di atas mengindikasikan bahwa lahan sawah di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 519.482 ha baru bisa ditanami 1,17 kali per hektar di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa lahan sawah banyak tidak termanfaatkan secara optimal.

✓ **Pemenuhan Kebutuhan Sendiri Benih Tanaman Pangan di Provinsi Sumatera Selatan masih rendah**

Tabel 18. Bantuan Benih dan Saprodi Pengembangan Padi Tahun 2021-2025

No	Sumber Bantuan	Tahun (Ha)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	APBN	40,575	30,641	145,169	218,200	158,323
2	APBD	-	3,000	10,000	2,500	15,000
	TOTAL	40,575	33,641	155,169	220,700	173,323

Dari tabel di atas, masih terbatasnya pemenuhan kebutuhan benih di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan untuk pemenuhan produksi padi 4 (empat) juta ton di Tahun 2026 akan dicapai dengan strategi

intervensi bantuan benih untuk pertanaman seluas 200.000 Ha melalui sumber pembiayaan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

✓ **Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)**

Serangan OPT menjadi salah satu permasalahan di dalam peningkatan produksi pertanian. Sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 19. Luas Serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura	Ha	822.80	339.56	397.35	386.06	643.24
2	Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan	Ha	24,945.72	17,867.19	17,543.24	13,133.44	17,081.28

Tabel di atas menunjukkan bahwa di tahun 2024 terjadi peningkatan serangan OPT baik di komoditi tanaman pangan maupun hortikultura. Untuk itu, di program 5 (lima) tahun ke depan penangana terhadap serangan OPT menjadi salah satu prioritas pertanian di Provinsi Sumatera Selatan.

✓ **Ketergantungan pada Cuaca dan Iklim**

Tabel 20. Karakteristik Luas Baku Sawah Provinsi Sumatera Selatan

No.	Luas Baku Sawah ATR/BPN 2019 SUMSEL (Ha)		%
	Typologi Lahan	Luas (Ha)	
1	Irigasi	75.798	16,11
2	Tadah Hujan	52.912	11,24
3	Pasang Surut	214.454	45,57
4	Lebak	127.438	27,08
Jumlah		470.602	100,00

Jika dilihat pada tipologi lahan baku sawah di Provinsi Sumatera Selatan, hampir 70% merupakan lahan sawah pasang surut dan rawa lebak. Hal ini menjadi salah satu

faktor yang mempengaruhi produksi pertanian khususnya padi di wilayah Sumatera Selatan karena penanaman padi tergantung dari air yang menggenangi lahan sawah.

Tabel 21. Luas Area Terdampak Perubahan Iklim Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan	Ha	12,920.05	3,437.50	6,271.75	2,958.02	7,753.00

Selain itu, cuaca dan iklim juga sangat mempengaruhi kondisi sawah, jika curah hujan tinggi maka akan terjadi kemunduran jadwal tanam begitu juga jika terjadi kekeringan. Sebagaimana tabel di atas yang menunjukkan terjadi peningkatan luas serangan area yang terdampak iklim. Hal ini tetap menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan solusi terhadap permasalahan ini.

✓ **Fluktuasi Harga dan Tengkulak**

Harga hasil pertanian yang tidak stabil dan petani sering bergantung pada tengkulak. Di Tahun 2025 telah dibentuk Tim yang terdiri dari beberapa OPD Provinsi Sumatera Selatan untuk menjaga harga pembelian pemerintah (HPP) gabah yang ditetapkan sebesar Rp. 6.500 per kilogram. Hal ini bertujuan untuk melindungi petani dan memastikan stabilitas pasokan beras. Permasalahan ini akan menjadi perhatian untuk ke depannya dan tim yang sudah dibentuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

✓ **Ketimpangan Akses Petani Kecil terhadap Program**

Petani kecil yang tidak terdaftar di dalam aplikasi Simultan yang menjadi dasar dalam pemberian bantuan pemerintah

2.2.2 Isu Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan

Pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan tidak terlepas dari dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global, yang ditelaah melalui pendekatan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas fungsi pelayanan Perangkat Daerah.

Perumusan isu strategis dalam KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan mengelompokkan isu dan disintesa menyesuaikan dengan kondisional secara faktual terhadap apa yang terjadi di Sumatera Selatan. Isu strategis didapatkan dengan menggunakan metode *cross-cutting* antara Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan kinerja capaian TPB; Isu Strategis RPJPD 2025- 2045; Isu strategis RPD 2024-2026; Isu KLHS RTRW Provinsi Sumatera dan Isu Masukan Pokja dan Peserta Konsultasi Publik. Berdasarkan Hasil *cross-cutting* tersebut didapatkan ranking setiap pasangan *cross-cutting*. Selanjutnya adalah proses penjumlahan ranking *cross-cutting* sehingga didapatkan Hasil TPB prioritas (Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, 2024).

Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan juga memaparkan bahwa metode *longlist* isu (Daftar Isu Panjang) digunakan Untuk mendapatkan isu strategis PB (Pembangunan Berkelanjutan). Longlist isu didapatkan dari Isu Strategis RPJPD 2025- 2045; Isu strategis RPD 2024-2026; Isu KLHS RTRW Provinsi Sumatera dan Isu Masukan Pokja dan Peserta Konsultasi Publik. Berdasarkan hal tersebut dihasilkan isu strategis PB diharapkan dengan memperbaiki isu tersebut dapat memberikan dampak yang positif sehingga menciptakan sinergitas dalam pembangunan dengan tetap memperhatikan lingkungan hidup. Melalui proses Konsultasi Publik dan FGD, maka ditetapkan Isu Paling Strategis (Isu Strategis PB) untuk KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 ada 9 (sembilan), yaitu:

1. Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting;

2. Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Belum Optimal;
3. Kerentanan Ketahanan Pangan;
4. Tata kelola perikanan, pesisir dan pulau-pulau kecil 193 Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Sumatera Selatan;
5. Ancaman keanekaragaman hayati;
6. Alih fungsi lahan dan gambut;
7. Belum optimalnya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
8. Polusi dan kerusakan lingkungan;
9. Belum optimalnya pengelolaan SDA berkelanjutan.

Dari kesembilan isu strategis tersebut, terdapat beberapa isu KLHS yang relevan dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrim dan Stunting, Kerentanan Ketahanan Pangan, Alih Fungsi Lahan dan Gambut, serta belum optimalnya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Selain itu beberapa yang menjadi isu global, nasional dan regional menjadi hal-hal yang diperhatikan dalam penyusunan rencana strategis untuk 5 (lima) tahun ke depan. Isu global saat ini berupa Krisis Pangan Global Saat Iklim Ekstrim; kemudian Isu Nasional berupa Alih Fungsi Lahan Pertanian, Perubahan Iklim Ekstrim, Petani didominasi Umur Tua, Kualitas SDM masih rendah, dan Jumlah Penyuluh Terbatas, serta Isu Regional berupa Produktivitas Pertanian dan Hilirisasi Komoditi Unggulan belum optimal, Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Lahan, Banjir dan Tanah Longsor belum optimal, serta Kemiskinan yang masih tinggi. Isu-isu tersebut dapat ditarik menjadi isu-isu yang akan diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga 2025 (bulan Maret) baik di pedesaan maupun di perkotaan. Di tahun 2020, persentase penduduk miskin sebesar 12,66% dan menurun di tahun 2025 (bulan Maret) menjadi 10,15% berdasarkan data BPS Sumatera Selatan. Jika dilihat dari kategori

perkotaan dan pedesaan, maka persentase penduduk miskin di Tahun 2025 di pedesaan (10,79%) lebih besar dibandingkan dengan daerah perkotaan (9,10%).

Permasalahan kemiskinan di perdesaan yang umumnya bekerja di sektor pertanian mengindikasikan rendahnya produktivitas yang dihasilkan dari lapangan usaha sektor pertanian, yang disebabkan oleh rendahnya kepemilikan lahan, kurangnya pengetahuan dan keterampilan serta kurangnya modal usaha tani.

Terdapat 2 (dua) strategi dalam upaya penurunan angka kemiskinan yaitu peningkatan produksi dan produktivitas komoditi padi, serta Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Sampai dengan tahun 2024, luas baku lahan sawah (LBS) terus diupayakan untuk meningkat dan di tahun 2024 terjadi peningkatan LBS dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 48.878 ha dari 470.604 ha menjadi 519.482 ha. Dengan bertambahnya LBS dan adanya dukungan program/ kegiatan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota), capaian produksi dan produktivitas khususnya komoditi padi mengalami peningkatan ke depannya. GSMP merupakan suatu gerakan yang dilaksanakan secara masif baik dengan pemberian bantuan bibit sachet maupun polybag serta edukasi kepada masyarakat untuk mengubah pola hidup yang semua konsumtif menjadi produktif dimulai dari pekarangan sendiri.

Selain itu, kesejahteraan petani menjadi topik utama di bidang pertanian. Semua program/ kegiatan yang dilaksanakan pemerintah diarahkan untuk kesejahteraan petani. Usaha pemerintah dalam hal peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura merupakan salah satu tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Selama ini, pemerintah telah mendukung tujuan tersebut dengan memberikan berbagai bantuan baik yang bersumber dari Dana APBN maupun APBD. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini bisa berdampak pada adanya ketergantungan petani terhadap bantuan pemerintah. Kondisi ini menjadi isu strategis ke depannya, yaitu bagaimana agar petani bisa mandiri dan tetap produktif dengan atau tanpa bantuan dari pemerintah.

Salah satu yang diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan ini yaitu melalui korporasi petani. Korporasi petani terus diupayakan oleh pemerintah, terutama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan sebagai *leading sector*. Dapat dilihat dengan adanya arahan dari Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Pertanian kemudian ditindaklanjuti oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tentang Konsep *Food Estate* yang sedang dijalankan di Provinsi Sumatera Selatan yaitu penumbuhan dan pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi. Provinsi Sumatera Selatan terdapat 12 (dua belas) korporasi yang berbadan hukum di 7 (tujuh) kabupaten, yaitu Kabupaten Ogan Ilir, OKI, OKU Timur, Muara Enim, Banyuasin, Musi Banyuasin, dan Musi Rawas. Konsep korporasi petani ini juga diarahkan kepada hilirisasi produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Sumatera Selatan.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2022 telah melakukan penyusunan *Master Plan Food Estate*. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi kabupaten/kota lain yang belum teralokasi untuk dapat mengidentifikasi kawasan mereka untuk menjadi kawasan *food estate* berikutnya.

Dari beberapa potensi, permasalahan dan isu strategis yang tercantum dalam dokumen KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, serta isu global, nasional dan regional, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis di Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana Tabel 22.

Tabel 22. Isu Strategis Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi Lahan Rawa Mineral Sumsel terluas se Indonesia (2,1 juta ha yang terdiri dari 0,885 juta ha rawa pasang surut dan 1,246 juta ha rawa lebak)	1. Rendahnya Indeks Pertanaman Tanaman Padi 2. Kecendrungan Konversi Lahan Pertanian ke Non Pertanian 3. Lahan Sawah belum termanfaatkan secara optimal 4. Pemenuhan Kebutuhan Sendiri Benih Tanaman Pangan masih rendah 5. Serangan Organisme Pengganggu Tanaman 6. Ketergantungan pada Cuasa dan Iklim 7. Fluktuasi Harga dan Tengkulak 8. Ketimpangan akses petani kecil terhadap program pemerintah.	1. Akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem dan stunting 2. Kerentanan Ketahanan Pangan 3. Alih Fungsi Lahan dan Gambut 4. Belum optimalnya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	1. Cuaca Ekstrem 2. Perubahan Kritisikal terhadap Ekosistem 3. Biodiversity Loss dan Gangguan Ekosistem	1. Krisis Lingkungan 2. Geopolitik dan Geoekonomi	1. Ketergantungan Komoditas Primer dan Rendahnya Nilai Tambah 2. Ancaman Degradasi Lingkungan	1. Kerentanan Ketahanan Pangan (Stabilitas Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Hilirisasi Pertanian TPH) 2. Belum Optimalnya Mitigasi Serangan OPT dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) 3. Alih Fungsi Lahan Pertanian 4. Rendahnya kapasitas penyuluhan pertanian 5. Pemenuhan 1 Desa 1 Penyuluh (Keberadaan PPEP di Provinsi Sumsel)

BAB III**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN****3.1 Tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029**

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029; Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah; serta mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan maka ditetapkan tujuan penyusunan renstra ini adalah untuk menyelaraskan program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, mencapai tujuan pembangunan daerah secara lebih efektif dan efisien, serta mempertajam target kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura agar sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka untuk mendukung pencapaian Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2025-2029.

Tujuan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan tersebut mengacu kepada Tujuan RPJMD Kedua berupa Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkeadilan berbasis Sumber Daya Lokal, serta Sasaran Strategisnya berupa Meningkatnya Perekonomian Sektor Unggulan.

Dari tujuan RPJMD tersebut turunannya berupa tujuan di level perangkat daerah yaitu Meningkatnya Kesejahteraan Petani dengan indikator Nilai Tukar Petani. Oleh karena Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan memiliki tugas dan fungsi hanya subsektor tanaman pangan dan hortikultura, maka indikator tujuannya hanya nilai tukar petani sub sektor tanaman pangan dan hortikultura saja.

3.2 Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Sasaran Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, ruang lingkup dinas sesuai dengan tugas dan fungsi adalah secara umum mencakup peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan penggunaan teknologi pertanian inovatif, peningkatan jumlah petani milenial, serta peningkatan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan, menjaga ketersediaan produksi tanaman pangan dan hortikultura, khususnya komoditi padi, jagung dan cabai besar.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 23. Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Misi II : Mewujudkan Ketahanan Ekonomi berbasis Sumber Daya Lokal dan Berkelanjutan dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Tujuan 2 (RPJMD) : Terwujudnya Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Daerah Sasaran Strategis Level 2 (RPJMD) : Meningkatnya Pengembangan Potensi Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura		Nilai Tukar Petani :							
			- Sub Sektor Tanaman Pangan	100,24	100,50	100,50	101,00	101,00	101,05	101,05
			- Sub Sektor Tanaman Hortikultura	91,42	100,00	100,05	100,10	100,15	100,20	100,25
		Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan :							
			- Padi (%)	2,71	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
			- Jagung (%)	0,86	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
			Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura :							
			- Cabai Besar (%)	15,18	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektora Provinsi	A	A	A	A	A	A	A

3.3 Strategi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Adapun strategi/ rencana tindakan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran, meliputi :

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, berupa Penyediaan Benih Padi, Jagung, Cabe, Bawang Merah dan saprodi; Pemeliharaan Tanaman Buah-Buahan; dan Penyediaan Alat-Alat Mesin Pertanian sesuai dengan usulan kabupaten/kota.
2. Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), dengan melakukan gerakan berupa sosialisasi/ pembinaan/ penyediaan benih/ bibit tanaman khususnya tanaman hortikultura kepada rumah tangga/ masyarakat di lokasi-lokasi terdampak inflasi.
3. Dukungan Pendampingan Pengembangan Infrastruktur Irigasi (Optimasi Lahan) sehingga dapat berdampak bagi peningkatan produksi dan produktivitas komoditi tanaman pangan.
4. Dukungan Pendampingan Perluasan Lahan Sawah sebagaimana ditargetkan sehingga dapat berdampak bagi ketahanan pangan.
5. Identifikasi Jumlah/ Varietas/ Kebutuhan Tanaman Sayuran khususnya komoditi penyumbang inflasi (cabe besar dan bawang merah) di 4 (empat) kota/ kabupaten (Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten OKI, dan Kabupaten Muara Enim).
6. Identifikasi Jumlah/ Varietas/ Kebutuhan Tanaman Buah-Buahan Unggulan khususnya buah durian dan duku agar terjaga keberadaan dan kelestariannya di kawasan sentra produksi.
7. *Food Estate/* KSPP Berbasis Korporasi melalui peningkatan kapasitas korporasi/ penyediaan bantuan sarana prasarana pasca panen (Dryer/ RMU/ Combine/ Power Thresher), serta akses pembiayaan dan pemasaran usaha ekonomis petani.

- 8. Penguatan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian, berupa Membatasi alih fungsi lahan untuk memastikan keberlanjutan produksi pangan dengan program LP2B.
- 9. Pemenuhan 1 desa 1 penyuluh sesuai dengan kebijakan dan aturan pemerintah.
- 10. Adaptasi terhadap Perubahan Iklim, berupa Meningkatkan penggunaan varietas padi tahan cuaca ekstrem dan memperkuat sistem peringatan dini bencana.
- 11. Pemberdayaan dan Pelatihan Petani dan Penyuluh, berupa Memberikan edukasi kepada petani tentang teknik pertanian berkelanjutan (presisi).

3.4 Penahapan Pembangunan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, dibutuhkan strategi yang dapat dilakukan secara bertahap. Adapun strategi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 24. Penahapan Rencana Strategis Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Gerakan Sumsel Mandiri Pangan Palembang	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan Kota Lubuk Linggau	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan Kabupaten OKI	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan Kabupaten Muara Enim	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan Kota Palembang
Dukungan Pendampingan Pengembangan Infrastruktur Irigasi (Optimasi Lahan)	Dukungan Pendampingan Pengembangan Infrastruktur Irigasi (Optimasi Lahan)	Dukungan Pendampingan Pengembangan Infrastruktur Irigasi (Optimasi Lahan)	Dukungan Pendampingan Pengembangan Infrastruktur Irigasi (Optimasi Lahan)	Dukungan Pendampingan Pengembangan Infrastruktur Irigasi (Optimasi Lahan)

Dukungan Pendampingan Perluasan Lahan Sawah	Dukungan Pendampingan Perluasan Lahan Sawah	Dukungan Pendampingan Perluasan Lahan Sawah	Dukungan Pendampingan Perluasan Lahan Sawah	Dukungan Pendampingan Perluasan Lahan Sawah
Identifikasi Jumlah/ Varietas/ Kebutuhan Tanaman Cabai Merah dan Bawang Merah di Kab. OI, OKI, Muara Enim, Kota Prabumulih	Identifikasi Jumlah/ Varietas/ Kebutuhan Tanaman Cabai Merah dan Bawang Merah di Kab. Lahat, Empat Lawang dan Kota Pagaralam	Identifikasi Jumlah/ Varietas/ Kebutuhan Tanaman Cabai Merah dan Bawang Merah di Kab. Pali, Mura, Muratara, Kota Lubuk Linggau	Identifikasi Jumlah/ Varietas/ Kebutuhan Tanaman Cabai Merah dan Bawang Merah di Kab. Banyuasin, Muba, Kota Palembang	Identifikasi Jumlah/ Varietas/ Kebutuhan Tanaman Cabai Merah dan Bawang Merah di Kab. OKU, OKUT, dan OKUS
Identifikasi Inventarisasi dan Pemuktahiran Basis Data Tanaman Buah Berkelanjutan : Komoditi Duku (Kab.OKU Timur), Jeruk (Kab.OKU) dan Nanas (Kota Prabumulih)	Identifikasi Inventarisasi dan Pemuktahiran Basis Data Tanaman Buah Berkelanjutan : Komoditi Duku (Kab.OKI), Jeruk (Kab.OKU Timur) dan Nanas (Kab. OI)	Identifikasi Inventarisasi dan Pemuktahiran Basis Data Tanaman Buah Berkelanjutan : Komoditi Duku (Kab.OKU dan Muara Enim), Jeruk (Kab. Banyuasin dan OI) dan Nanas (Kab. Muara Enim)	Identifikasi inventarisasi dan pemutakhiran basis data tanaman buah berkelanjutan: Komoditi Duku (Kab. OKU Selatan, Jeruk (Kab. Muara Enim), dan Durian (Kab. Muara Enim)	Identifikasi inventarisasi dan pemutakhiran basis data tanaman buah berkelanjutan: Komoditi Duku (Kab. Muara Enim, Jeruk (Kab. Ogan Ilir), dan Durian (Kota Lubuk Linggau)
Food Estate/ KSPP Berbasis Korporasi melalui peningkatan kapasitas korporasi petani dan penyediaan bantuan sarana prasarana pasca panen (Dryer)	Food Estate/ KSPP Berbasis Korporasi melalui penyediaan bantuan sarana prasarana pasca panen (Power Thresher)	Food Estate/ KSPP Berbasis Korporasi melalui penyediaan bantuan sarana prasarana pasca panen (Dryer/ RMU/ Combine/ Power Thresher/ Corn Sheller)	Food Estate/ KSPP Berbasis Korporasi melalui penyediaan bantuan sarana prasarana pasca panen (Dryer/ RMU/ Combine/ Power Thresher/ Corn Sheller)	Food Estate/ KSPP Berbasis Korporasi melalui penyediaan bantuan sarana prasarana pasca panen (Dryer/ RMU/ Combine/ Power Thresher/ Corn Sheller)
Penguatan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian berupa sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi dan monev di Kab. OKU	Penguatan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian berupa sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi dan monev di Lahat	Penguatan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian berupa sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi dan monev di Kab. Pali	Penguatan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian berupa sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi dan monev di Kab. OKI	Penguatan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian berupa sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi dan monev di Kota Palembang
Pemenuhan 1 Desa 1 Penyuluh (Alokasi Petugas Pendamping Ekonomi Pertanian/ PPEP) 17 Kab/Kota	Pemenuhan 1 Desa 1 Penyuluh (Alokasi Petugas Pendamping Ekonomi Pertanian/ PPEP) 17 Kab/Kota	Pemenuhan 1 Desa 1 Penyuluh (Alokasi Petugas Pendamping Ekonomi Pertanian/ PPEP) 17 Kab/Kota	Pemenuhan 1 Desa 1 Penyuluh (Alokasi Petugas Pendamping Ekonomi Pertanian/ PPEP) 17 Kab/Kota	Pemenuhan 1 Desa 1 Penyuluh (Alokasi Petugas Pendamping Ekonomi Pertanian/ PPEP) 17 Kab/Kota

Adaptasi terhadap Perubahan Iklim 17 kab/kota	Adaptasi terhadap Perubahan Iklim 17 kab/kota	Adaptasi terhadap Perubahan Iklim 17 kab/kota	Adaptasi terhadap Perubahan Iklim 17 kab/kota	Adaptasi terhadap Perubahan Iklim 17 kab/kota
Pemberdayaan dan Pelatihan Petani	Pemberdayaan dan Pelatihan Petani	Pemberdayaan dan Pelatihan Petani	Pemberdayaan dan Pelatihan Petani	Pemberdayaan dan Pelatihan Petani
Pelatihan Penyuluh Pertanian bagi Aparatur 60 orang	- Pelatihan Penyuluh Pertanian bagi Apatur 120 orang - Pelatihan Penyuluh Pertanian bagi Petani 60 orang	- Pelatihan Penyuluh Pertanian bagi Apatur 180 orang - Pelatihan Penyuluh Pertanian bagi Petani 120 orang	- Pelatihan Penyuluh Pertanian bagi Apatur 240 orang - Pelatihan Penyuluh Pertanian bagi Petani 150 orang	- Pelatihan Penyuluh Pertanian bagi Apatur 280 orang - Pelatihan Penyuluh Pertanian bagi Petani 160 orang

3.5 Arah Kebijakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Tahun 2025-2030, yaitu pada Tabel 25 dibawah ini.

Tabel 25. Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan

OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
1. Permentan No. 03 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian 2. Permentan No. 15 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi 3. Kepmentan RI No. 02/Kpts/RC.040/M/01/2025 tentang Kawasan Pertanian Nasional 4. Pasal 46 Ayat 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Penyediaan Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang Penyuluh dalam 1 (satu) desa	Optimalisasi Peningkatan Kesejahteraan Petani melalui Strategi Meningkatkan Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, serta Meningkatkan Akses Permodalan dan Sarana Pertanian	1. Stabilitas Produksi TPH melalui : Peningkatan Produksi TPH dengan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian TPH; Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP); Pengembangan Infrastruktur Irigasi (Optimasi Lahan) dan Perluasan Lahan Sawah; Identifikasi Jumlah dan Varietas Sayur dan Buah Unggulan/ Strategis Sumsel) 2. Pengembangan Food Estate/ KSPP Berbasis Korporasi 3. Pemenuhan Ketentuan 1 Desa 1 Penyuluh

		4. Penguatan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian 5. Adaptasi terhadap Perubahan Iklim 6. Pemberdayaan dan Pelatihan Petani
--	--	--

BAB IV**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN****4.1 Uraian Program Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan**

Untuk mencapai target tujuan dan sasaran strategis terdapat beberapa strategi kebijakan yang diwujudkan dalam beberapa program sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Program-program tersebut, yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dan Program Penyuluhan Pertanian. Program-program tersebut harus sejalan dengan outcome yang dihasilkan dengan indikatornya masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Dari program-program tersebut diuraikan kembali menjadi kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.2 Uraian Kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan

Beberapa kegiatan yang ada di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan meliputi :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;

- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 9) Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian;
- 10) Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman;
- 11) Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian;
- 12) Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi;
- 13) Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;
- 14) Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian;
- 15) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan.

4.3 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029; Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah; serta mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Hasil telaah ditetapkan dengan memperhatikan tujuan, sasaran dan indikator/ target kinerja yang harus dicapai, dan strategi arah kebijakan yang harus dilakukan maka untuk pencapaian kinerja tersebut disusun rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun dari tahun 2025–2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 26. Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra 2025-2029 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
MISI II : Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal dan Berkelanjutan dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat							
Tujuan 2 (RPJMD) : Terwujudnya Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Daerah							
Sasaran Strategis Level 2 (RPJMD) : Meningkatnya Pengembangan Potensi Ekonomi Sektor Unggulan Daerah					Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)		

	Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis			Nilai Tukar Petani Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura		
					Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		
					Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura		
		Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana Pertanian			Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
				Meningkatnya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Dokumen Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
						Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
						Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan	
						Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Sarana Pasca Panen Hortikultura	

						Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
						Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
				Meningkatnya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Dokumen Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
						Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	
						Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	
						Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
						Sub Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	
						Sub Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	
			Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Prasarana Pertanian		Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
				Meningkatnya Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian TPH yang difasilitasi	Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	
						Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana,	

						Kawasan dan Komoditas Pertanian	
						Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	
						Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
						Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	
						Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pasca Panen Hortikultura	
						Sub Kegiatan Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara Numerik dan Spasial di Tingkat Provinsi	
						Sub Kegiatan Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Tingkat Provinsi	
						Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan	

						Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Tingkat Provinsi	
			Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Persentase Penanganan Bencana Pertanian dan DPI terhadap Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
				Meningkatnya Pelindungan Tanaman	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian TPH yang Difasilitasi	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	
						Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
						Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
						Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
						Sub Kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	

			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian		Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan dan Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk	Program Penyuluhan Pertanian	
				Meningkatnya Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Ketenagaan Penyuluhan Pertanian yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	
						Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	
						Sub Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	
				Meningkatnya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penerapan Penyuluhan Pertanian yang Difasilitasi	Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	
						Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	
				Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang Ditingkatkan	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	

				Petani Berbasis Kawasan	Kapasitasnya (Lembaga)	Sub Kegiatan Pendampingan dan Pengawalan Korporasi Petani	
						Sub Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	
						Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Korporasi Petani	
						Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	

Dengan memperhatikan tujuan, sasaran dan indikator/target kinerja yang harus dicapai, dan strategi arah kebijakan yang harus dilakukan maka untuk pencapaian kinerja tersebut disusun rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun dari tahun 2025–2029. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dengan Tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Petani khususnya Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta Sasaran Strategis Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis khususnya komoditi padi, jagung dan cabe besar.

Tabel 27. Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025-2030 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BA SE LI NE 20 24	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030			
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	53,709,807,200	100	56,185,753,000	100	62,569,924,320	100	61,601,826,353	100	62,849,366,207	100	68,488,703,320		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Kinerja Tahunan (dok)	1	1	870,864,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)		-	-	100	1,440,687,000	100	1,650,000,000	100	1,700,000,000	100	1,750,000,000	100	2,100,000,000		
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dok)	4	4	605,164,200	3	890,687,000	3	550,000,000	3	400,000,000	3	450,000,000	4	800,000,000		Ketahanan Pangan (Perencanaan mendukung kebutuhan KSPP/ Food Estate)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dok)	-		-		-	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dok)	-		-		-	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000		

RENCANA STRATEGIS

2025-2029

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dok)	-		-		-	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dok)	-		-		-	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi capaian kinerja SKPD dan laporan hasil penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (dok)	-		-		-	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000		
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan)	3	3	265,700,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah data statistik sektoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah (dok)	-	-	-	1	300,000,000	2	350,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam rangka penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam rangka penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	-	-	-	-	-	1	250,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	43,631,383,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Persentase Laporan Administrasi Keuangan yang tersusun (%)		-	-	100	49,436,826,000	100	49,916,253,000	100	50,470,444,320	100	50.953,226,353	100	51,433,766,207		
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (org/ bulan)	290	418	41,030,202,000	376	47,107,132,000	376	47,107,132,000	376	47,578,203,320	376	48,053,985,353	376	48,534,525,207		
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (dokumen)	5	5	2,601,181,000	5	2,122,554,000	5	2,601,181,000	5	2,673,241,000	5	2,673,241,000	5	2,673,241,000		

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	-		-	5	121,300,000	5	105,940,000	5	115,000,000	5	120,000,000	5	120,000,000		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	-		-	1	46,000,000	1	51,000,000	1	52,000,000	1	53,000,000	1	53,000,000		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD (Laporan)	-		-	3	39,840,000	3	51,000,000	3	52,000,000	3	53,000,000	3	53,000,000		
Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Perkantoran (%)	100	100	127,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah yang tersusun (%)	-	-	-	100	130,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000		
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD (dok)	1	1	75,000,000	1	75,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000		
Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah (laporan)	1	1	52,800,000	1	55,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000		
Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Ketaatan terhadap aturan kepegawaian (%)	100	100	102,340,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Persentase Administrasi Kepagawaian yang terlayani (%)		-	-	100	150,000,000	100	602,500,000	100	602,500,000	100	517,500,000	100	307,500,000		
Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai (unit)	-		-		-	20	50,000,000	20	50,000,000	20	50,000,000	20	50,000,000		
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (paket)	-		-		-	376	295,000,000	376	295,000,000	376	210,000,000	-	-		
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	-		-		-	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000		

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	10	10	102,340,000	10	150,000,000	10	132,500,000	10	132,500,000	10	132,500,000	10	132,500,000		
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	-	-	-	-	5	25,000,000	5	25,000,000	5	25,000,000	5	25,000,000		
Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Perkantoran (%)	100	100	3,794,420,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlayani (%)	-	-	-	100	1,863,240,000	100	3,020,000,000	100	2,565,000,000	100	2,670,000,000	100	3,592,200,000		
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	1	1	63,200,000	1	140,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000		
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	1	2	1,814,900,000	-	-	1	680,000,000	1	500,000,000	1	330,000,000	1	1,527,200,000		
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	-	-	-	-	-	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000		
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	2	2	191,000,000	3	377,800,000	4	365,000,000	4	365,000,000	4	365,000,000	4	365,000,000		
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	1	1	55,000,000	1	50,000,000	1	75,000,000	1	100,000,000	1	75,000,000	1	100,000,000		
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dokumen)	1	1	55,000,000	1	55,000,000	1	55,000,000	1	55,000,000	1	55,000,000	1	55,000,000		
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah paket bahan/ material yang disediakan (paket)	-	-	-	-	-	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000		
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu (laporan)	-	-	-	-	-	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi (laporan)	2	4	865,320,000	2	1,140,440,000	2	1,000,000,000	2	1,000,000,000	2	1,000,000,000	2	1,000,000,000		
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	-	-	-	-	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000		

RENCANA STRATEGIS

2025-2029

Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD (dokumen)	1	1	750,000,000	1	100,000,000	1	500,000,000	1	200,000,000	1	500,000,000	1	200,000,000		
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Perkantoran (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (%)	-	-	-	-	-	100	775,000,000	100	775,000,000	100	775,000,000	100	775,000,000		
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	-		-		-	6	725,000,000	6	725,000,000	6	725,000,000	6	725,000,000		
Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit Aset Lainnya yang disediakan (unit)	-		-		-	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Perkantoran (%)	100	100	1,615,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (%)	-	-	-	100	1,780,000,000	100	2,229,500,000	100	2,229,500,000	100	2,229,500,000	100	2,229,500,000		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	1	1	5,000,000	1	5,000,000	2	3,500,000	2	3,500,000	2	3,500,000	2	3,500,000		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan listrik yang disediakan (laporan)	4	4	1,610,000,000	4	1,775,000,000	4	2,220,000,000	4	2,220,000,000	4	2,220,000,000	4	2,220,000,000		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	-		-		-	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000		
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Perkantoran (%)	100	100	3,548,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (%)		-	-	100	1,385,000,000	100	3,605,600,000	100	2,483,600,000	100	3,173,600,000	100	7,265,391,861.00		

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara & dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	253	250	900,000,000	250	625,000,000	250	900,000,000	250	900,000,000	250	900,000,000	250	900,000,000		
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	135	2	152,000,000	2	160,000,000	1	165,600,000	1	173,600,000	1	173,600,000	1	173,600,000		
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	1	2	2,516,000,000	1	600,000,000	1	2,540,000,000	1	1,410,000,000	1	2,100,000,000	1	5,666,791,861		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas Pengembangan Komoditi Tanaman Pangan (ha)	2500	12,000	34,658,160,830		35,143,597,730		72,073,872,700		78,228,319,881		128,523,753,555		246,830,795,350		
	Luas Pengembangan Komoditi Tanaman Hortikultura (ha)	29	32													
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (ton)	-	-	-	15.000		25.500		27.500		39.500		47.500			
	Peningkatan Produksi Hortikultura (ton)	-	-	-	13		400		400		400		400			
Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Dokumen Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (dok)	1	5	29,481,811,595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Persentase Peredaran Sarana Pertanian yang terawasi (%)		-	-	100	31,943,597,730	100	69,735,922,700	100	75,613,784,881	100	125,526,159,055	100	243,311,993,000		
Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian (laporan)	4	4	28,880,786,595	6	30,954,639,215	7	64,940,245,000	7	70,227,617,881	7	100,012,511,055	7	130,911,294,000	GSMP	Ketahanan Pangan (Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Peredaran Sarana Pertanian (Dokumen)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Peredaran Sarana Pertanian (Dokumen koordinasi)	-			3	200,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000		
Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan (Laporan)	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan	-	1	425,000,000	1	588,958,515	3	1,915,000,000	3	2,450,000,000	3	22,530,000,000	3	109,330,000,000		

RENCANA STRATEGIS

2025-2029

Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Sarana Pasca Panen Hortikultura (Laporan)	-			1	50,000,000	1	250,677,700	1	306,167,000	1	353,648,000	1	440,699,000		
Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura (Laporan)	-			1	50,000,000	3	1,580,000,000	3	1,580,000,000	3	1,580,000,000	3	1,580,000,000		
Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan (laporan)	-	1	176,025,000	1	100,000,000	3	850,000,000	3	850,000,000	3	850,000,000	3	850,000,000		
Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Dokumen Pengawasan Mutu, Penyediaan dan peredaran benih TPH yang difasilitasi (dok)	-	2	5,176,349,235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Persentase Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman yang terawasi (%)		-	-	100	3,200,000,000	100	2,337,950,000	100	2,614,535,000	5	2,997,594,500	5	3,518,802,350		
Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah sertifikat benih (sertifikat)	-	22	3,435,445,000	20	250,000,000	78	594,300,000	109	832,020,000	153	1,164,828,000	214	1,630,759,200	GSMP	Ketahanan Pangan (Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian)
Sub Kegiatan Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang (Batang)	-			6,000	1,700,000,000	6,000	500,000,000	6,000	500,000,000	6,000	500,000,000	6,000	500,000,000		
Sub Kegiatan Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/ Benih	Jumlah Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/ Benih (Ton)	-			24	350,000,000	33	780,000,000	48	780,000,000	51	780,000,000	53	780,000,000		
	- Benih Padi Label Ungu (Ton)				24	350,000,000	27	530,000,000	36	530,000,000	39	530,000,000	41	530,000,000		
	- Benih Padi Label Biru (Ton)					-	6	250,000,000	12	250,000,000	12	250,000,000	12	250,000,000		
Sub Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (laporan)	3	2	1,740,904,235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sub Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (laporan)	-			2	250,000,000	2	275,000,000	2	295,000,000	2	324,500,000	2	356,950,000		

Sub Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/ varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (laporan)	-			3	650,000,000	3	188,650,000	3	207,515,000	3	228,266,500	3	251,093,150		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	-	-	-	1,014	850,000,000	3,000	3,936,349,214	3,619	2,600,000,000	12,000	2,600,000,000	12,000	22,311,476,700		
	Peningkatan Luas Lahan Siap Tanam :			1,339,804,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Padi (Ha)	-	3													
Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian TPH yang difasilitasi (unit)	-	4	1,339,804,300												
	Persentase Prasarana Pertanian yang tertata (%)				100	850,000,000	100	3,936,349,214	100	2,600,000,000	100	2,600,000,000	100	22,311,476,700		
Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah rencana pengembangan prasarana. Kawasan dan komoditas pertanian (dok)	-			1	100,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	GSMP	Ketahanan Pangan (Suasembada Pangan, Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian)
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani (dok)	1	2	944,804,300	1	200,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	5,000,000,000		
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	-			1	150,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000		
Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah gedung UPTD Pertanian serta sarana pendukungnya yang dibangun, dipelihara dan direhabilitasi (unit)	3	3	395,000,000	1	100,000,000	1	1,836,349,214	1	500,000,000	1	500,000,000	1	11,000,000,000		
Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah Prasarana Pascapanen Hortikultura yang di kendalikan dan dimanfaatkan (unit)	-					-	-	-	-		-		5,211,476,700	GSMP	Ketahanan Pangan (Suasembada Pangan, Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian)

Sub Kegiatan Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara Numerik dan Spasial di Tingkat Provinsi	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara Numerik dan Spasial di Tingkat Provinsi (Dokumen)	-					1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000		
Sub Kegiatan Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Tingkat Provinsi (Dokumen)	-			1	150,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000		
Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2 B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP 2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LC P2B di Tingkat Provinsi	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi (Dokumen)	-			1	150,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000		
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				643,720,000		400,000,000		2,250,000,000		2,250,000,000		2,100,000,000		2,250,000,000		
	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	-			95		95		95		95		95			
	Persentase Penanganan DPI terhadap Pertanian (%)	-			65		65		65		65		65			
	Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi															
	- Tanaman Pangan (Ha)	30 17 6	1,015													
	- Hortikultura (Ha)	10 71	70													
Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian TPH yang difasilitasi (kali)	-	215	643,720,000												
	Persentase Bencana Pertanian Provinsi yang terkendali dan tertanggulangi (%)				95	400,000,000	95	2,250,000,000	95	2,250,000,000	95	2,100,000,000	95	2,250,000,000		
Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,	Jumlah luas serangan OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan (ha)		1,085	508,800,000	1,000	200,000,000	1,550	950,000,000	1,550	950,000,000	1,550	800,000,000	1,550	950,000,000	GSMP	Ketahanan Pangan (Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian)
	- Tanaman Pangan (Ha)	29 776					1,450		1,450		1,450		1,450			

RENCANA STRATEGIS
2025-2029

Hortikultura dan Perkebunan	- Hortikultura (Ha)	971					100		100		100		100			
Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (ha)		330	134,920,000	400	200,000,000	500	400,000,000	500	400,000,000	500	400,000,000	500	400,000,000		
	Tanaman Pangan (Ha)	400					400		400		400		400			
	Hortikultura (Ha)	100					100		100		100		100			
Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah luasan pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Ha)	-					500	500,000,000	500	500,000,000	500	500,000,000	500	500,000,000		
Sub Kegiatan Penanggulangan n Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Laporan)	-					1	400,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000		
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				27,977,858,400		25,750,000,000		34,000,000,000		34,550,000,000		35,475,000,000		35,900,000,000		
	Persentase Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan				2		2		2		2		2			
	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang dibentuk				10		10		10		10		10			
	Jumlah kelembagaan penyuluh yang meningkat kapasitasnya (unit)	34	34													
	Jumlah kelembagaan pertani yang meningkat kapasitasnya (unit)	-	7													
	Jumlah kemitraan usaha tani (unit)	-	1													
Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah ketenagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)	-	60	737,845,000												
	Persentase Ketenagaan Penyuluhan Pertanian yang dikembangkan (%)				2	200,000,000	2	2,750,000,000	2	3,250,000,000	2	3,625,000,000	2	4,000,000,000		
Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian (Unit)	-					17	800,000,000	17	800,000,000	17	800,000,000	17	800,000,000	GSMP	Ketahanan Pangan (Pendayagunaan Penyuluh Pertanian)

RENCANA STRATEGIS

2025-2029

Sub Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	-	60	737,845,000	60	200,000,000	183	1,950,000,000	303	2,450,000,000	393	2,825,000,000	463	3,200,000,000		
Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penerapan penyuluhan pertanian yang difasilitasi (dok)	2	2	26,486,317,000												
	Persentase Penerapan Penyuluhan Pertanian yang dikembangkan (%)				2	25,350,000,000	2	30,300,000,000	2	30,350,000,000	2	30,400,000,000	2	30,450,000,000		
Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (dokumen)	1	1	248,920,000	1	350,000,000	1	300,000,000	1	350,000,000	1	400,000,000	1	450,000,000	GSMP	Ketahanan Pangan (Pendayagunaan Penyuluh Pertanian)
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan (kelompok)	1400	1,300	26,237,397,000	1,015	25,000,000,000	1,300	30,000,000,000	1,300	30,000,000,000	1,300	30,000,000,000	1,300	30,000,000,000		
Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang ditingkatkan kapasitasnya (lembaga)	-	8	753,696,400												
	Persentase Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani berbasis kawasan yang dikembangkan (%)				10	200,000,000	10	950,000,000	10	950,000,000	10	1,450,000,000	10	1,450,000,000		
Sub Kegiatan Pendampingan dan Pengawasan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang ddampingi (Unit)	-	7	578,902,000	-	-	9	950,000,000	9	950,000,000	9	950,000,000	9	950,000,000	GSMP	Ketahanan Pangan
Sub Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah Korporasi Petani yang dibentuk dan Beroperasi (Unit) Petani (laporan)	-	1	174,794,400	1	200,000,000					5	150,000,000	5	150,000,000		
Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Korporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dinilai Kelayakan dan Standarisasi Manajemennya (unit)	-									7	100,000,000	7	100,000,000		
Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (unit)	-									25	250,000,000	25	250,000,000		
				118,329,350,730		118,329,350,730		174,359,074,914		178,354,364,201		230,667,579,908		374,895,630,118		

Tabel 27 di atas menggambarkan Rincian Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2030. Namun, pada dasarnya pagu anggaran yang teralokasi di Tahun 2025-2030 belum sepenuhnya dapat mengakomodir target kinerja yang ditetapkan Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumsel. Harapannya, untuk mencapai target tersebut tidak hanya dari sumber Dana APBD, tetapi bisa diakomodir juga dari sumber anggaran lain yaitu APBN, mitra dinas/petani, dan swadaya petani.

4.4 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang telah diuraikan di Tabel 27, maka terdapat kegiatan/sub kegiatan prioritas yang mendukung Prioritas Pembangunan Daerah. Kegiatan/sub kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 28 di bawah ini.

Tabel 28. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana Pertanian	Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
			Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Mempertahankan swasembada beras dan meningkatkan produksi pangan lainnya (Sumsel Lumbung Pangan Nasional); Ketersediaan Pupuk yang Mudah Terjangkau; Meningkatkan produksi tanaman lainnya
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
			Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan	
			Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Sarana Pasca Panen Hortikultura	
			Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
			Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
			Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	

			Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Mempertahankan swasembada beras dan meningkatkan produksi pangan lainnya (Sumsel Lumbung Pangan Nasional); Meningkatkan produksi tanaman lainnya
			Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Meningkatkan produksi tanaman lainnya
			Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Mempertahankan swasembada beras dan meningkatkan produksi pangan lainnya (Sumsel Lumbung Pangan Nasional)
			Sub Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Mempertahankan swasembada beras dan meningkatkan produksi pangan lainnya (Sumsel Lumbung Pangan Nasional)
			Sub Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	Meningkatkan produksi tanaman lainnya
		Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Prasarana Pertanian	Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	
			Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Mempertahankan swasembada beras dan meningkatkan produksi pangan lainnya (Sumsel Lumbung Pangan Nasional)
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
			Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	
			Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	
			Sub Kegiatan Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara Numerik dan Spasial di Tingkat Provinsi	
			Sub Kegiatan Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Tingkat Provinsi	

			Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Tingkat Provinsi	
		Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	
			Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Mempertahankan swasembada beras dan meningkatkan produksi pangan lainnya (Sumsel Lumbung Pangan Nasional), Meningkatkan Produksi Lainnya
			Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			Sub Kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
		Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	
			Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	Mempertahankan swasembada beras dan meningkatkan produksi pangan lainnya (Sumsel Lumbung Pangan Nasional), Meningkatkan Produksi Lainnya
			Sub Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	
			Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	
			Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Mempertahankan swasembada beras dan meningkatkan produksi pangan lainnya (Sumsel Lumbung Pangan Nasional), Meningkatkan Produksi Lainnya
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Melanjutkan Program Satu Desa Satu Penyuluh
			Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	
			Sub Kegiatan Pendampingan dan Pengawasan Korporasi Petani	Mendukung Program <i>Food Estate</i>
			Sub Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	

Berdasarkan Tabel 28 di atas, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang teralokasi di Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan mendukung Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Tahun 2025-2029 di Program Strategis III, yaitu Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) meliputi Mmepertahankan Swasembada Beras dan Meningkatkan Produksi Pangan Lainnya (Sumsel Lumbung Pangan Nasional), Melanjutkan Program Satu Desa Satu Penyuluh Pertanian, Ketersediaan Pupuk yang mudah terjangkau, Mendukung Program *Food Estate*, dan Meningkatkan Produksi Tanaman Lainnya.

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan di Tahun 2025-2029 memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan menjadi tolak ukur Kinerja Dinas dan Kepala Dinas setiap tahunnya sebagaimana Tabel 29 di bawah ini.

Tabel 29. Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan :									
	- Padi	%	2,71	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
	- Jagung	%	0,86	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	
2.	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura :									
	- Cabai Besar	%	15,18	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	

Tabel 29 di atas menunjukkan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi tolak ukur kinerja Dinas dan Kepala Dinas setiap tahunnya. Terdapat 3 (tiga) komoditi yang menjadi komoditi strategis/ prioritas di Provinsi Sumatera Selatan yaitu padi, jagung dan cabe besar. Harapannya untuk mencapai target kinerja tersebut didukung oleh APBD, APBN, Swasta dan Swadaya Petani. Penentuan target setiap tahunnya dilihat dari capaian tahun 2024 dan data series capaian 5 (lima) tahun terakhir.

4.6 Target Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan

Selain IKU, kinerja dilihat juga dari turunan dari IKU yaitu Indikator Kinerja Kunci sebagaimana Tabel 30. Indikator kinerja kunci ini berpedoman kepada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 dan menjadi tanggung jawab dari Pejabat Eselon III di bawah Kepala Dinas.

Tabel 30. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Peningkatan Ubi Kayu	%	n/a	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
2	Persentase Peningkatan Produksi Bawang Merah	%	n/a	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
3	Persentase Peningkatan Produksi Jeruk	%	n/a	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
4	Persentase Peningkatan Produksi Nanas	%	n/a	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
5	Persentase Peningkatan Produksi Duku	%	n/a	n/a	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
6	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	ha	n/a	n/a	1.014	3.000	3.619	12.000 0	12.000	Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
7	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	%	n/a	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
8	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim terhadap Pertanian	%	n/a	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
9	Persentase Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	%	n/a	n/a	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
10	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	%	n/a	n/a	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan ini disusun sebagai dasar rencana pembangunan pertanian yang akan dibiayai dengan dana APBD Provinsi Sumatera Selatan dan didukung dana APBN (dekonsentrasi dan tugas pembantuan provinsi) yang pada akhirnya merupakan indikator kinerja pertanggungjawaban dinas.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai dokumen dasar perencanaan pembangunan menengah daerah Tahun 2025-2029 yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD tahunan Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu tahun 2025-2029.

Secara substansial, Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan menekankan pada :

- a) Stabilitas Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP); Pengembangan Infrastruktur Irigasi (Optimasi Lahan) dan Perluasan Lahan Sawah; Identifikasi Jumlah dan Varietas Sayur dan Buah Unggulan/Strategis Sumsel)
- b) Pengembangan *Food Estate*/KSPP Berbasis Korporasi
- c) Pemenuhan Ketentuan 1 (satu) Desa 1 (satu) Penyuluh
- d) Penguatan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian
- e) Adaptasi terhadap Perubahan Iklim
- f) Pemberdayaan dan Pelatihan Petani

Dalam pelaksanaan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan juga memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, partisipatif, transparan, akuntabel, serta berbasis kinerja. Selain itu, pembangunan pertanian juga mengarusutamakan agenda pembangunan nasional sebagaimana diamanahkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029, meliputi :

- 1) Gender dan inklusi sosial dengan memastikan akses setara bagi laki-laki, perempuan dan kelompok rentan dalam pemanfaatan dan pengelolaan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- 2) Pembangunan berkelanjutan, melalui kebijakan penguatan perlindungan lahan pertanian, serta adaptasi terhadap perubahan iklim.
- 3) Transformasi Digital, dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam perencanaan, pelayanan publik, pengawasan dan sistem informasi pertanian.
- 4) Pembangunan rendah karbon, dengan pemanfaatan pupuk organik dan pengelolaan lahan pertanian berbasis kawasan lingkungan.
- 5) Pembangunan berketahanan iklim, dengan melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim serta penanganan dampak perubahan iklim

Rencana strategis ini menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan pelaksanaan program kerja. Untuk menjamin ketercapaian sasaran, diperlukan mekanisme pengendalian dan evaluasi yang konsisten melalui :

1. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Berbasis SAKIP, dengan indikator yang terukur dan berbasis data.
2. Pengendalian internal melalui penerapan SPIP dan manajemen risiko organisasi.
3. Evaluasi berkala sebagai bahan pengambilan keputusan, perbaikan kebijakan, serta penyesuaian terhadap dinamika pembangunan dan tantangan lapangan.
4. Pelaporan akuntabilitas kinerja secara transparan untuk memperkuat kepercayaan publik dan memastikan keselarasan dengan target pembangunan daerah maupun nasional.

Dengan demikian, Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, tidak hanya sebagai dokumen perencanaan, tetapi sebagai instrumen strategis dalam memecahkan permasalahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kritik dan saran untuk kesempurnaan Renstra ini pada akhirnya sangat diharapkan dan semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi kita semua.